

ANALISIS PENERIMAAN PAJAK INDONESIA: PENDEKATAN EKONOMI MAKRO



SKRIPSI

Diajukan sebagai salah satu syarat
Untuk menyelesaikan Program Sarjana (S1)
Pada Program Sarjana Fakultas Ekonomika dan Bisnis
Universitas Diponegoro

Disusun Oleh:

AMALIA WIJAYANTI
NIM 12020111130043

FAKULTAS EKONOMIKA DAN BISNIS
UNIVERSITAS DIPONEGORO
SEMARANG
2015

PERSETUJUAN SKRIPSI

Nama Penyusun : Amalia Wijayanti
Nomor Induk Mahasiswa : 12020111130043
Fakultas/Jurusan : Ekonomika dan Bisnis/ Ilmu Ekonomi dan Studi
Pembangunan
Judul Skripsi : **ANALISIS PENERIMAAN PAJAK
INDONESIA: PENDEKATAN EKONOMI
MAKRO**
Dosen Pembimbing : Firmansyah, M.Si., Ph.D

Semarang, 11 Juni 2015

Dosen Pembimbing,

(Firmansyah, M.Si., Ph.D.)

NIP. 19740427 199903 1001

PENGESAHAN KELULUSAN UJIAN

Nama Penyusun : Amalia Wijayanti
Nomor Induk Mahasiswa : 12020111130043
Fakultas/Jurusan : Ekonomika dan Bisnis/ Ilmu Ekonomi dan Studi
Pembangunan
Judul Skripsi : **ANALISIS PENERIMAAN PAJAK
INDONESIA: PENDEKATAN EKONOMI
MAKRO**

Telah dinyatakan Lulus Ujian pada 24 Juni 2015

Tim Penguji :

1. Firmansyah, M.Si., Ph.D. (.....)
2. Wahyu Widodo, M.Si., Ph.D. (.....)
3. Alfa Farah, S.E., M.Sc. (.....)

Mengetahui,
Pembantu Dekan I,

Anis Chariri, S.E., M.Com., Ph.D., Akt.
NIP. 19670809 199203 1001

PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini saya, Amalia Wijayanti, menyatakan bahwa skripsi dengan judul : **ANALISIS PENERIMAAN PAJAK INDONESIA: PENDEKATAN EKONOMI MAKRO**, adalah tulisan saya sendiri. Dengan ini saya menyatakan dengan sesungguhnya bahwa dalam skripsi ini tidak terdapat keseluruhan atau sebagian tulisan orang lain yang saya ambil dengan cara menyalin atau meniru dalam bentuk rangkaian kalimat atau simbol yang menunjukkan gagasan atau pendapat atau pemikiran dari penulis lain, yang saya akui seolah-olah sebagai tulisan saya sendiri, dan/atau tidak terdapat bagian atau keseluruhan tulisan yang saya salin itu, atau yang saya ambil dari tulisan orang lain tanpa memberikan pengakuan penulis aslinya.

Apabila saya melakukan tindakan yang bertentangan dengan hal tersebut di atas, baik disengaja maupun tidak, dengan ini saya menyatakan menarik skripsi yang saya ajukan sebagai hasil tulisan saya sendiri ini. Bila kemudian terbukti bahwa saya melakukan tindakan menyalin atau meniru tulisan orang lain seolah-olah hasil pemikiran saya sendiri, berarti gelar dan ijasah yang telah diberikan oleh universitas batal saya terima.

Semarang, 11 Juni 2015

Yang membuat pernyataan

Amalia Wijayanti

NIM 12020111130043

Barang siapa menghendaki kehidupan dunia maka wajib baginya memiliki ilmu, dan barang siapa yang menghendaki kehidupan akhirat, maka wajib baginya memiliki ilmu, dan barang siapa menghendaki keduanya maka wajib baginya memiliki ilmu
(HR. Turmudzi)

Man Jadda Wa Jadda, Man Shabara Zhafira

Untuk Ibu dan Bapak, serta Kakak tercinta

ABSTRACT

The role of government in economy is very important, particularly in providing of public goods and services. The government requires funds that come from state receipt to provide public goods and services. As a major source state receipt, tax revenue has some problems every year. One of problems occurred during the last five years is related the number of realized tax revenue are smaller than the specified target or commonly called shortfall. To solve that problem, condition of macroeconomic factors also need to be considered in addition to tax base and tax rate policies.

This study analyzes the behavior of long-run and short-run effect of macroeconomic factors, such as real Gross Domestic Product (GDP), inflation rate, exchange rate and state spending on Indonesia's tax revenue during the period 1976-2013. In this study used Error Correction Model (ECM) to analyze effect of each macroeconomic factor on tax revenue in long-run and short-run. The results of estimation find that Indonesia's tax revenue is affected by real GDP, exchange rate, and state spending. Meanwhile inflation rate don't has significant influence on Indonesia's tax revenue in long-run model. In short-run model, Indonesia's tax revenue is only affected by state spending, while others variable don't have significant influence on Indonesia's tax revenue. In short-run model estimation also obtained Error Correction Term (ECT) coefficient is 0.221. That value explains incompatibility tax revenue occur in long-run will be corrected of 22 percent.

Keywords: role of government, tax revenue, macroeconomic factors, state spending, Error Correction Model (ECM)

ABSTRAK

Peran pemerintah dalam perekonomian sangat dibutuhkan, khususnya dalam menyediakan barang dan jasa publik. Pemerintah memerlukan dana yang berasal dari penerimaan negara guna menyediakan barang dan jasa publik. Sebagai sumber utama penerimaan negara, penerimaan pajak memiliki permasalahan yang selalu diperbincangkan tiap tahunnya. Salah satu permasalahan yang terjadi selama lima tahun terakhir ini adalah terkait jumlah realisasi penerimaan pajak yang lebih kecil daripada target yang telah ditentukan atau yang biasa disebut *shortfall*. Untuk mengatasi permasalahan tersebut, kondisi faktor ekonomi makro perlu untuk dipertimbangkan selain kebijakan terkait dasar pengenaan pajak dan tarif pajak.

Penelitian ini menganalisis perilaku efek jangka panjang dan jangka pendek variabel-variabel ekonomi makro, berupa produk domestik bruto (PDB) riil, inflasi, nilai tukar rupiah terhadap USD, serta belanja negara, terhadap penerimaan pajak Indonesia selama periode 1976-2013. Pada penelitian ini digunakan model koreksi kesalahan (*Error Correction Model/ECM*) untuk menganalisis pengaruh masing-masing variabel ekonomi makro terhadap penerimaan pajak dalam jangka panjang maupun jangka pendek. Hasil estimasi menunjukkan bahwa penerimaan pajak Indonesia dipengaruhi oleh variabel PDB, nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika, dan belanja negara, sedangkan variabel inflasi tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap penerimaan pajak Indonesia dalam model jangka panjang. Pada model jangka pendek penerimaan pajak Indonesia hanya dipengaruhi oleh belanja negara, sedangkan variabel lainnya tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap penerimaan pajak Indonesia. Pada estimasi model jangka pendek juga diperoleh nilai koefisien bentuk koreksi kesalahan (*Error Correction Term/ECT*) sebesar 0,221 yang menunjukkan bahwa ketidaksesuaian penerimaan pajak yang terjadi pada jangka panjang akan dikoreksi sebesar 22 persen.

Kata kunci: peran pemerintah, penerimaan pajak, faktor ekonomi makro, belanja negara, *Error Correction Model* (ECM)

KATA PENGANTAR

Alhamdulillahirabbil'alamin,

Segala puji bagi Allah SWT karena atas berkah dan karunia yang dilimpahkan-Nya selama ini, penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Syukur tiada henti penulis sampaikan atas seluruh nikmat yang diberikan kepada penulis selama ini. Tanpa petunjuk dan kemudahan yang diberikan-Nya mungkin penulisan skripsi ini akan terasa lebih sulit. Terima kasih telah menjadi tempat sandaran dan tempat bercerita penulis selama ini. Engkaulah sebaik-baiknya tempat bercerita dan mengadu, ya Allah.

Penulis mengucapkan terima kasih kepada pihak-pihak yang telah membantu dan mendukung penulis selama masa studi di Fakultas Ekonomika dan Bisnis (FEB) Universitas Diponegoro sampai penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Terima kasih kepada Dr. Suharnomo, S.E., M.Si. selaku dekan FEB Undip, serta Dr. Hadi Sasana selaku ketua jurusan IESP yang telah memberikan penulis ruang untuk berproses dan belajar banyak hal selama beberapa tahun terakhir ini.

Kepada Firmansyah, Ph.D., dosen pembimbing skripsi penulis, penulis ucapkan banyak terima kasih atas pendampingan, masukan, dan arahan yang beliau berikan dalam penulisan skripsi ini. Tanpa itu semua mungkin skripsi ini tidak akan ada. Terima kasih juga atas ilmu, inspirasi, serta motivasi yang selalu dibagikan kepada penulis selama penulisan skripsi. Terima kasih juga kepada Wahyu Widodo, Ph.D. dan Alfa Farah, M.Sc. selaku dosen penguji yang telah memberikan banyak masukan berharga bagi perbaikan skripsi ini.

Perjalanan penulis di bangku perkuliahan tidak terlepas dari peran dosen wali. Terima kasih kepada Banatul Hayati, S.E., M.Si., selaku dosen wali penulis, atas bimbingan dan dukungan yang telah diberikan kepada penulis. Terima kasih juga penulis ucapkan kepada Alfa Farah, S.E., M.Sc. atas obrolan dan kesempatan yang telah diberikan kepada penulis untuk membantu beliau sebagai asisten.

Tak lupa ucapan terima kasih juga diucapkan teruntuk seluruh dosen serta staf Fakultas Ekonomika dan Bisnis Undip atas ilmu dan pembelajaran yang telah diberikan selama kurang lebih empat tahun terakhir ini. Atas ilmu, pengalaman, cerita, dan motivasi, penulis ucapkan terima kasih kepada dosen-dosen jurusan IESP. Bangku perkuliahan tak hanya soal belajar ilmu akademik semata, banyak pengalaman diluar itu juga telah didapatkan oleh penulis. Pengalaman berorganisasi dan menulis sempat penulis dapatkan selama tiga tahun perkuliahan di LPM Edents. Terima kasih teruntuk senior Edents, Mas Hendy, Mas Shuna, Mbak Fani, Mbak Haya atas pembelajaran dan pemikiran-pemikiran hebat kalian yang dapat memotivasi dan mengubah cara berpikir penulis. Kepada teman seperjuangan penulis di Edents, Wenny dan Mima, terima kasih selalu menjadi tempat penulis untuk menyampaikan keluh kesah dan permasalahan. Terima kasih kepada para wadya bala Edents rasa kekeluargaan yang telah diberikan kepada penulis selama ini.

Terasa kurang lengkap kehidupan perkuliahan tanpa kehadiran teman-teman. Kepada teman-teman seperjuangan dan sepermainan, Nurul Qolbi, Kurnia Afsari, Ariska Rini, Ina Irawanti, Dian Adelia, Afrina Zuchra, dan Intan Restyarani, terima kasih atas candaan, obrolan, semangat, dan kenangan yang kalian berikan kepada penulis. Terima kasih juga teruntuk keluarga besar IESP 2011 yang telah memberikan warna bagi penulis selama 4 tahun ini. Kepada keluarga KKN “Demangan Ceria” terima kasih atas kekeluargaan dan dukungan yang diberikan kepada penulis. Kepada teman-teman kos Tirtasari 4A, terima kasih atas dukungan dan kebersamaan selama ini.

Terakhir, penulis ucapkan terima kasih yang tulus dan tak terbatas kepada Bapak, Purwiyanto, serta Ibu, Setyowati, atas cinta, kasih sayang, pengorbanan, doa, serta dukungan yang tak terhitung selama ini. Tanpa kalian penulis bukanlah apa-apa. Kepada kakak-kakak penulis, Anindito Prabowo dan Emili Vidia, terima kasih atas dukungan, semangat, dan doa yang diberikan kepada penulis. Karena keluarga merupakan sumber semangat utama bagi penulis.

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
PERSETUJUAN SKRIPSI	ii
PENGESAHAN KELULUSAN UJIAN	iii
PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI	iv
ABSTRACT	vi
ABSTRAK	vii
KATA PENGANTAR	viii
DAFTAR TABEL	xiii
DAFTAR GAMBAR	xiv
DAFTAR LAMPIRAN	xv
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Rumusan Masalah	11
1.3. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	12
1.4. Sistematika Penulisan	13
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	15
2.1. Landasan Teori	15
2.1.1. Peran Pemerintah dalam Perekonomian	15
2.1.2. Pajak sebagai Sumber Utama Penerimaan Pemerintah	21
2.1.3. Pengaruh Kondisi Perekonomian terhadap Penerimaan Pajak	25
2.1.3.1. Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi terhadap Penerimaan Pajak ...	26
2.1.3.2. Pengaruh Inflasi terhadap Penerimaan Pajak	28
2.1.3.3. Pengaruh Nilai Tukar terhadap Penerimaan Pajak	32
2.1.3.4. Pengaruh Belanja Negara terhadap Penerimaan Pajak	37
2.2. Penelitian Terdahulu	44

2.3. Kerangka Pemikiran Teoritis	47
2.4. Hipotesis Penelitian	50
BAB III METODE PENELITIAN	51
3.1. Variabel Penelitian dan Definisi Operasional Variabel	51
3.1.1. Variabel Penelitian	51
3.1.2. Definisi Operasional Variabel	51
3.2. Jenis dan Sumber Data	55
3.2.1. Jenis Data	55
3.2.2. Sumber Data	55
3.3. Metode Analisis	56
3.3.1. Model Empiris	56
3.3.1.1. Estimasi Hubungan Keseimbangan Jangka Panjang	57
3.3.1.2. Estimasi Hubungan Jangka Pendek	58
3.3.2. Uji Normalitas dan Pelanggaran Asumsi Klasik	60
3.3.2.1. Uji Normalitas	60
3.3.2.2. Uji Multikolinearitas	60
3.3.2.3. Uji Heteroskedastisitas	61
3.3.2.4. Uji Autokorelasi	63
3.3.2.5. Metode Newey-West HAC	64
3.3.3. Pengujian <i>Goodness of Fit</i> (R^2)	65
3.3.4. Pengujian Hipotesis Statistik	65
3.3.4.1. Pengujian Koefisien Regresi Serentak (Uji F)	65
3.3.4.2. Pengujian Koefisien Regresi Individu (Uji t)	66
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN	67
4.1. Perkembangan Perekonomian dan Penerimaan Pajak di Indonesia	67
4.2. Analisis Data	76
4.2.1. Uji Normalitas dan Pelanggaran Asumsi Klasik	76
4.2.2. Interpretasi Hasil	78
4.3. Diskusi dan Pembahasan Hasil Estimasi	82

BAB V PENUTUP	88
5.1. Simpulan	88
5.2. Saran	89
5.2.1. Kebijakan	90
5.2.2. Agenda Penelitian Selanjutnya	92
DAFTAR PUSTAKA	94
LAMPIRAN	97

DAFTAR TABEL

	Halaman	
Tabel 4.1	Penerimaan Pajak (non-migas) dan Penerimaan Migas Indonesia	
	Tahun 1974-1987	68
Tabel 4.2	Statistik Deskriptif Pertumbuhan Penerimaan Pajak dan Variabel	
	Ekonomi makro Indonesia (1976-2013)	74
Tabel 4.3	Hasil Estimasi Penerimaan Pajak pada Jangka Panjang	79
Tabel 4.4	Hasil Estimasi Penerimaan Pajak pada Jangka Pendek	81

DAFTAR GAMBAR

	Halaman
Gambar 1.1	Perkembangan Penerimaan Pajak dan Penerimaan Bukan Pajak Indonesia Tahun 2007-2014 4
Gambar 1.2	Perkembangan Sumber Pendanaan dan Belanja Negara Indonesia Tahun 2008-2014 5
Gambar 1.3	Perkembangan Penerimaan Pajak (APBN-P dan Realisasi) dan <i>Shortfall</i> Indonesia Tahun 2009-2013 6
Gambar 2.1	Aliran Dana Sektor Publik dalam Perekonomian 17
Gambar 2.2	Kurva Hubungan PDB Riil dan Penerimaan Pajak 28
Gambar 2.3	Kurva Hubungan Tingkat Inflasi dan Penerimaan Pajak 31
Gambar 2.4	Kurva Hubungan Nilai Tukar Riil dan Penerimaan Pajak 37
Gambar 2.5	Kurva Hubungan Belanja Negara dan Penerimaan Pajak 44
Gambar 2.6	Kerangka Pemikiran Teoritis 49
Gambar 4.1	Tren Perkembangan Penerimaan Pajak, Belanja Negara, Nilai Tukar Rupiah terhadap USD, dan PDB Riil Indonesia (Tahun 1976- 2013) 71
Gambar 4.2	Tren Perkembangan Penerimaan Pajak dan Indeks Harga Konsumsi Indonesia (Tahun 1976-2013) 72

DAFTAR LAMPIRAN

	Halaman
Lampiran A Data Runtun Waktu tiap Variabel Penelitian	96
Lampiran B Hasil Estimasi EViews 8.0	98

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Pada tatanan kehidupan bernegara, pemerintah merupakan penyelenggara negara yang bertugas untuk mengatur negara di berbagai bidang kehidupan, salah satunya dalam bidang perekonomian. Pada bidang perekonomian, pemerintah memiliki kewajiban untuk menciptakan kesejahteraan rakyat melalui pelaksanaan pembangunan. Pemerintah sebagai penyelenggara negara juga memiliki fungsi utama dalam perekonomian, yaitu; pertama fungsi alokasi, pemerintah melakukan alokasi anggaran untuk pengadaan barang-barang publik yang diperlukan oleh masyarakat. Kedua fungsi distribusi, yaitu pemerintah bertugas untuk mendistribusikan pendapatan dan kekayaan secara adil, agar tingkat ketimpangan antar masyarakat berkurang, dan ketiga fungsi stabilisasi, pemerintah bertugas untuk menjaga kestabilan perekonomian negara (Musgrave dan Musgrave, 1989). Peran pemerintah juga dinilai semakin penting dalam perekonomian jika dikaitkan dengan pelaku-pelaku utama perekonomian lainnya. Perekonomian suatu negara tidak hanya dapat dijalankan oleh sektor swasta (rumah tangga, perusahaan, dan luar negeri) saja, tetapi perlu kerjasama dengan sektor pemerintah untuk menstabilkan perekonomian.

Terdapatnya kegagalan pasar (*market failure*) yang terkait dengan barang publik menegaskan bahwa pemerintah memegang peran yang strategis dalam perekonomian sebagai penyedia dan pemelihara barang-barang publik. Guna menjalankan fungsi dan peran dalam perekonomian, pemerintah memerlukan dana

untuk mendanai seluruh kegiatan bernegara. Dana yang digunakan tersebut berasal dari penerimaan pemerintah yang diperoleh dari berbagai sumber.

Penerimaan pemerintah merupakan dana yang diperoleh pemerintah dari berbagai sumber dan digunakan untuk mendanai seluruh aktivitas pemerintah, seperti untuk penyediaan barang dan jasa publik. Penerimaan pemerintah dapat berasal dari berbagai sumber, seperti; pajak, pinjaman (hutang), bantuan dari tingkat pemerintah lainnya, biaya administrasi, servis, serta penerimaan bisnis (Poole, 1956).

Di Indonesia, penerimaan pemerintah atau yang juga biasa disebut penerimaan negara bersumber dari pendapatan negara dan pembiayaan. Berdasarkan Undang-undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara, pendapatan negara didefinisikan sebagai hak pemerintah pusat yang diakui sebagai penambahan nilai kekayaan bersih dan terdiri dari pendapatan dalam negeri yang bersumber dari penerimaan pajak dan penerimaan negara bukan pajak; serta hibah yang diperoleh dari pemerintah negara lain maupun tingkat pemerintah lainnya. Penerimaan yang berasal dari pembiayaan bersumber dari pinjaman yang nantinya perlu dikembalikan.

Sebagai salah satu sumber penerimaan dalam negeri, penerimaan pajak berasal dari iuran wajib masyarakat yang dibayarkan kepada pemerintah dan pembebanannya berhubungan dengan aktivitas tertentu (Hyman, 2011). Pajak juga dapat diartikan sebagai pengalihan sumber daya dari sektor privat kepada sektor pemerintahan. Sumber penerimaan dalam negeri lainnya adalah penerimaan bukan pajak yang merupakan penerimaan pemerintah yang diperoleh selain dari penerimaan pajak, seperti penerimaan yang berasal dari sumber daya alam (SDA), penerimaan

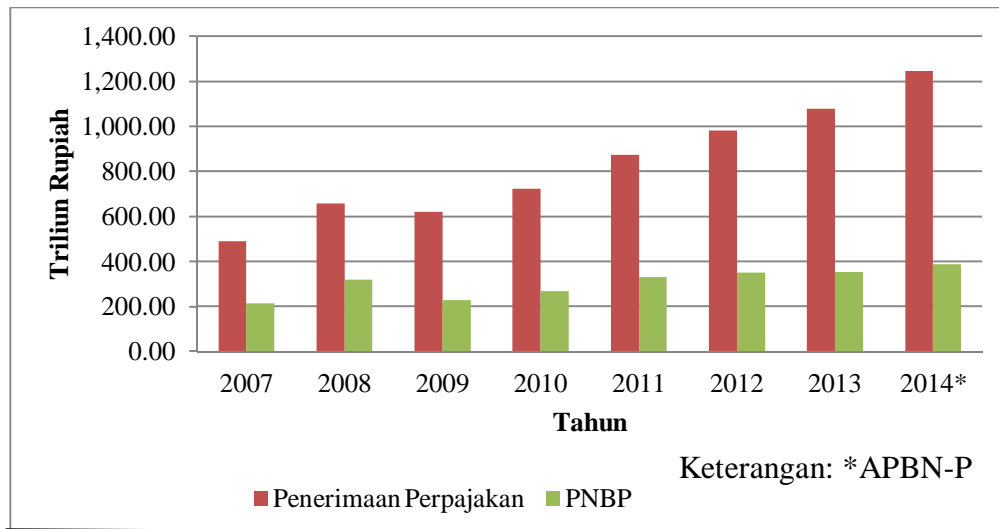
dari bagian keuntungan badan usaha atau perusahaan milik negara, dan penerimaan negara bukan pajak (PNBP) lainnya.

Pada umumnya di beberapa negara, penerimaan pemerintah terbesar berasal dari penerimaan pajak, seperti di Spanyol, Hungaria, Roma, Inggris, negara-negara *European Union*, dan Amerika Serikat. Penerimaan pajak pada beberapa negara yang tergabung dalam *European Union* memiliki proporsi lebih dari 50 persen dari total penerimaan negara (Şerban dan Talpoş, 2010). Tidak hanya di negara-negara Eropa, di negara-negara Asia, seperti di Jepang, Thailand, Cina, dan India penerimaan pemerintah terbesar juga berasal dari penerimaan pajak.

Sebagaimana kondisi negara-negara di atas, pendapatan negara di Indonesia juga didominasi oleh penerimaan pajak dibandingkan dengan penerimaan negara bukan pajak seperti pada periode tahun 2007 hingga 2014. Gambar 1.1 memperlihatkan bahwa penerimaan pajak Indonesia pada tahun 2007 mencapai Rp 491 triliun dengan kontribusi sebesar 70 persen dari total penerimaan dalam negeri, sedangkan sisanya berasal dari penerimaan bukan pajak dengan nilai sejumlah Rp 215,1 triliun. Sejalan dengan tren penerimaan pajak yang meningkat, kontribusi penerimaan pajak juga mengalami peningkatan pada tahun 2014. Penerimaan pajak mencapai angka Rp 1.246,1 triliun dan berkontribusi sebesar 76 persen pada pendapatan dalam negeri, sedangkan pada tahun yang sama penerimaan bukan pajak hanya Rp 386,9 triliun atau sebesar 24 persen dari pendapatan dalam negeri. Besarnya proporsi penerimaan pajak di Indonesia pada periode 2007 hingga 2014

tersebut menunjukkan bahwa penerimaan pajak cenderung mengalami peningkatan dan memiliki peran yang besar bagi sumber penerimaan dalam negeri.

Gambar 1.1. Perkembangan Penerimaan Pajak dan Penerimaan Bukan Pajak Indonesia Tahun 2007-2014



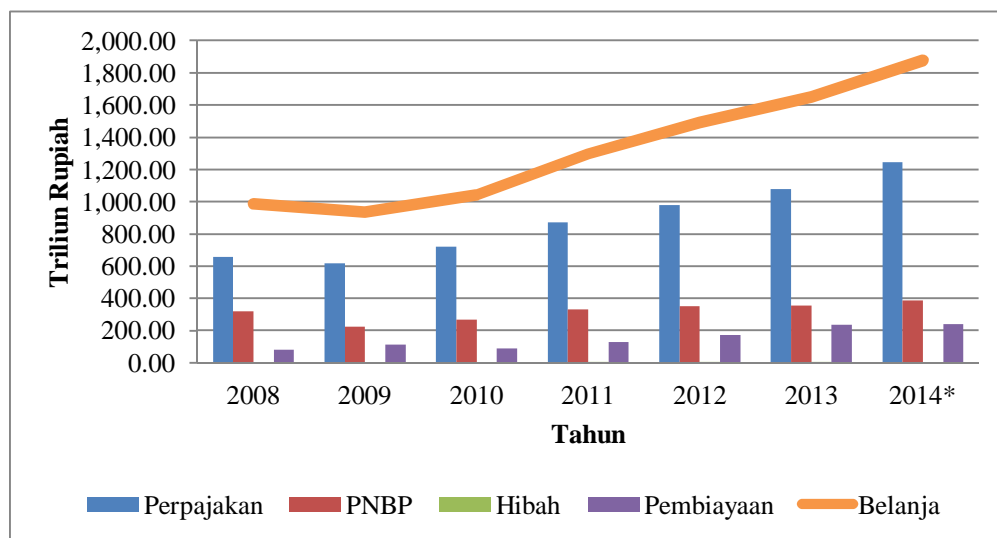
Sumber: Kementerian Keuangan, 2014 (diolah)

Pajak sebagai sumber utama pendapatan negara memiliki berbagai fungsi dalam perekonomian makro. Pajak dapat berfungsi untuk mendanai pengeluaran, serta aktivitas negara. Selain itu, pajak juga berfungsi untuk mengatur kondisi perekonomian. Pemerintah dapat membebaskan pajak yang tinggi atas produk luar negeri guna melindungi dan mendukung produk dalam negeri. Pajak juga dapat digunakan untuk membiayai jalannya kebijakan terkait dengan stabilitas tingkat harga dan proyek terkait redistribusi pendapatan. Berdasarkan penjelasan tersebut dapat disimpulkan bahwa pajak memiliki empat fungsi utama dalam perekonomian, yaitu

fungsi anggaran (*budgetair*), fungsi mengatur (*regulerend*), fungsi stabilitas, serta fungsi redistribusi pendapatan (Direktorat Penyusunan APBN, 2014).

Peran pajak juga dapat dilihat berdasarkan kontribusinya dalam mendanai belanja negara. Sebagai komponen pendapatan negara terbesar, penerimaan pajak juga merupakan sumber utama untuk mendanai belanja negara. Gambar 1.2 menunjukkan bahwa selama tujuh tahun terakhir, lebih dari 65 persen belanja negara Indonesia dibiayai dari penerimaan pajak, sedangkan pendanaan dari penerimaan non-pajak hanya sekitar 25 persen dan sisanya didanai dengan hibah, serta hutang. Hal tersebut menunjukkan bahwa penerimaan pajak memiliki peran yang strategis dalam mendanai belanja negara jika dibandingkan dengan sumber pendanaan lainnya.

Gambar 1.2. Perkembangan Sumber Pendanaan dan Belanja Negara Indonesia Tahun 2008-2014



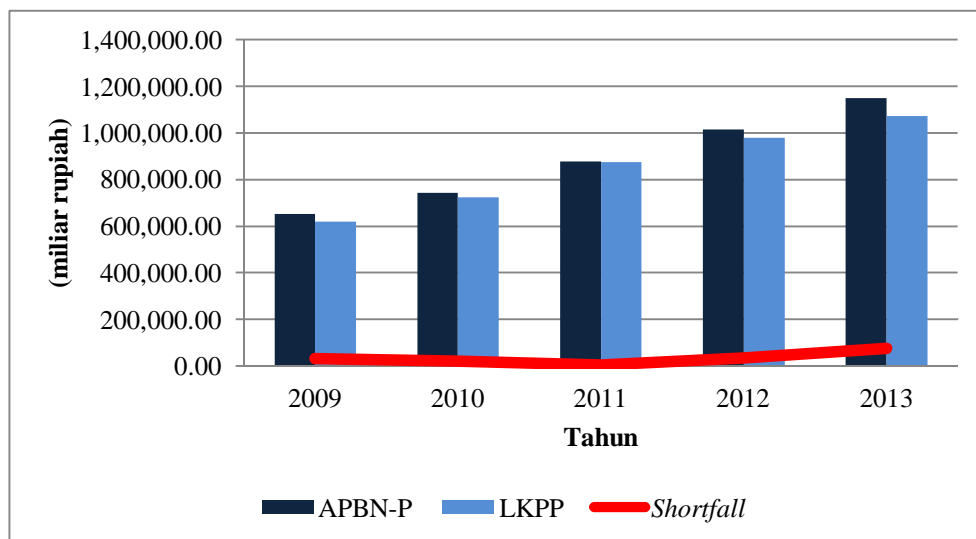
Sumber: Kementerian Keuangan, 2014 (diolah)

Terkait dengan perannya yang strategis, penerimaan pajak juga memiliki beberapa risiko. Salah satu risiko yang sering terjadi adalah realisasi penerimaan

pajak yang tidak mencapai targetnya atau biasa dikatakan *shortfall*. Permasalahan *shortfall* penerimaan pajak merupakan isu tahunan dalam penyusunan anggaran pendapatan dan belanja negara.

Selama lima tahun terakhir seperti yang diperlihatkan Gambar 1.3, penerimaan pajak Indonesia selalu mengalami *shortfall*. Pada tahun 2009 selisih antara realisasi dan target penerimaan pajak sebesar Rp 32.032,60 miliar. Perkembangan *shortfall* tersebut mengalami penurunan hingga tahun 2011 menjadi sebesar Rp 4.811,20 miliar. Pada tahun selanjutnya, yaitu pada tahun 2012, besar *shortfall* mengalami peningkatan yang tajam hingga mencapai Rp 35.719,20 miliar dan pada tahun 2013 tingkat *shortfall* tertinggi yaitu sebesar Rp 76.246 miliar.

Gambar 1.3. Perkembangan Penerimaan Pajak (APBN-P dan Realisasi) dan *Shortfall* Indonesia Tahun 2009-2013



Sumber: Kementerian Keuangan, 2014 (diolah)

Permasalahan terkait *shortfall* tersebut menjadikan penerimaan pajak kurang optimal guna menjalankan perannya dalam anggaran negara, khususnya dalam

membiyai belanja negara. Pemerintah perlu melakukan upaya-upaya guna mengatasi permasalahan tersebut. Upaya yang dapat dilakukan pemerintah antara lain mencari dana lain untuk menutupi belanja negara tersebut, dan/atau melakukan efisiensi belanja negara.

Berdasarkan peran dan permasalahan penerimaan pajak tersebut, maka perlu untuk dilakukan penyusunan dan perencanaan penerimaan pajak negara secara lebih akurat agar pajak dapat menjalankan peran dan fungsinya secara optimal dalam mendanai belanja negara. Penyusunan dan perencanaan penerimaan pajak secara akurat tersebut dapat dilakukan melalui penggunaan data yang akurat dan model perencanaan penerimaan yang representatif. Oleh karena itu, diperlukan model perencanaan penerimaan pajak yang akurat agar proyeksi penerimaan pajak dalam APBN tepat. Model perencanaan pajak sangat diperlukan mengingat bahwa penerimaan pajak sebagai sumber utama dana belanja negara, sehingga jika penerimaan pajak tidak memadai nantinya akan terdapat komponen belanja yang telah direncanakan tidak memiliki sumber dana.

Guna mengoptimalkan penerimaan pajak, penyusunan dan perencanaan model pajak perlu dilakukan dengan melibatkan faktor-faktor yang dinilai berpengaruh terhadap penerimaan pajak. Terkait hal tersebut telah banyak dilakukan studi mengenai faktor-faktor yang dapat mempengaruhi penerimaan pajak, salah satunya adalah faktor tradisional. Faktor tradisional dapat berupa unsur dasar pengenaan pajak (*tax base*) atau yang biasa disebut *tax handles*. Analisis faktor tersebut menggunakan variabel-variabel yang berhubungan dengan dasar pengenaan pajak

tersebut, seperti pendapatan per kapita sebagai dasar pajak penghasilan, rasio sektor pertambangan (minyak maupun non-minyak) terhadap PDB sebagai dasar pajak penghasilan migas, serta jumlah ekspor dan impor terhadap PDB sebagai dasar pajak perdagangan luar negeri, rasio sektor pertanian terhadap PDB. Variabel dasar pengenaan pajak terhadap penerimaan pajak pada umumnya menunjukkan hubungan yang positif. Hal tersebut karena jika dasar pengenaan pajak mengalami peningkatan maka jumlah pajak yang dibayarkan akan meningkat, sehingga penerimaan pajak pemerintah juga akan meningkat.

Studi mengenai pengaruh variabel dasar pengenaan pajak terhadap penerimaan pajak juga telah dilakukan di beberapa negara, seperti penelitian pada negara berkembang yang dilakukan oleh Ahmed (1994). Penelitian tersebut menunjukkan bahwa variabel *tax handles*, berupa pertumbuhan sektor industri dan pertumbuhan sektor impor, berpengaruh positif terhadap elastisitas penerimaan pajak (*tax buoyancy*), sedangkan variabel *tax handles* lainnya, berupa pertumbuhan sektor pertanian dan sektor jasa, menunjukkan pengaruh negatif terhadap elastisitas penerimaan pajak. Penelitian pengaruh variabel dasar pengenaan pajak terhadap penerimaan pajak juga dilakukan oleh Ghura (1998) dengan objek penelitian 39 negara di Sub-Sahara Eropa dengan variabel dasar pengenaan pajak berupa kontribusi pertanian terhadap PDB, keterbukaan ekonomi, dan sektor pertambangan (minyak dan non-minyak). Ghura menyimpulkan bahwa rasio penerimaan pajak terhadap PDB mengalami peningkatan ketika pendapatan dan keterbukaan ekonomi meningkat, terdapatnya sektor pertambangan, baik minyak dan non-minyak, serta kontribusi

pertanian terhadap PDB menurun. Rasio output pertanian terhadap PDB memiliki dampak negatif terhadap penerimaan pajak, karena sektor pertanian merupakan sektor informal, sehingga sektor pertanian tersebut tidak dikenakan pajak.

Selain variabel dasar pengenaan pajak, variabel kebijakan ekonomi makro juga memainkan peran penting dalam analisis penerimaan pajak. Variabel ekonomi makro, seperti produk domestik bruto (pertumbuhan ekonomi) yang juga merupakan faktor tradisional, tingkat inflasi, dan nilai kurs, dinilai memiliki pengaruh terhadap penerimaan pajak. Hubungan antar variabel ekonomi makro dan penerimaan pajak juga banyak diteliti di beberapa negara, salah satunya studi yang dilakukan oleh Zhang dan Cui (2008) dengan studi kasus Cina. Zhang dan Cui menyebutkan bahwa terdapat hubungan yang kuat antara penerimaan pajak dengan faktor ekonomi makro berupa produk domestik bruto, tingkat harga, dan perdagangan luar negeri.

Penelitian terkait lainnya juga dilakukan oleh Yuksel, Orhan, dan Oztunc (2013) dengan studi kasus Turki. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat korelasi yang tinggi antara penerimaan pajak dan variabel ekonomi makro berupa PDB, FDI, cadangan total, kredit domestik, ekspor, impor, nilai tukar, M2, dan jumlah penduduk. Selain itu, antara variabel penerimaan pajak dengan nilai tukar dan jumlah uang (M2) memiliki hubungan kausalitas dua arah, sedangkan penerimaan pajak dengan FDI dan persediaan hutang luar negeri memiliki hubungan kausalitas satu arah. Kebijakan ekonomi makro lainnya yang juga memiliki pengaruh terhadap penerimaan pajak adalah pengeluaran pemerintah. Pengeluaran pemerintah juga

merupakan instrumen kebijakan yang baik guna meningkatkan penerimaan pajak dalam jangka panjang (Aggrey, 2011).

Berdasarkan penelitian-penelitian yang dilakukan di beberapa negara, ketidakseimbangan ekonomi makro dan tingkat aktivitas ekonomi merupakan faktor/penggerak utama elastisitas pajak atau penerimaan pajak (Muibi dan Sinbo, 2011). Analisis faktor ekonomi makro juga merupakan hal yang penting dalam menyusun dan merencanakan penerimaan pajak. Kondisi variabel ekonomi makro juga digunakan sebagai acuan dalam menyusun berbagai komponen dari anggaran pendapatan dan belanja negara di Indonesia, salah satunya adalah penerimaan pajak. Variabel ekonomi makro tersebut disebut sebagai asumsi dasar ekonomi makro. Di Indonesia, asumsi dasar ekonomi makro meliputi enam indikator utama, berupa pertumbuhan ekonomi, inflasi, nilai tukar rupiah terhadap dollar US, suku bunga SPN 3 bulan, harga minyak mentah Indonesia, lifting minyak dan lifting gas Indonesia (Direktorat Penyusunan APBN, 2014).

Berdasarkan penjelasan dan bukti empiris di berbagai negara, maka analisis variabel-variabel ekonomi makro adalah penting dalam menyusun dan merencanakan penerimaan pajak. Selain itu, analisis variabel ekonomi makro juga merupakan hal yang penting dalam mengoptimalkan penerimaan pajak guna mendanai belanja negara. Pengaruh dinamika variabel-variabel ekonomi makro terhadap penerimaan pajak dalam jangka panjang dan jangka pendek juga merupakan bagian yang krusial dalam menganalisis penerimaan pajak, sehingga pada penelitian ini akan dibangun model koreksi kesalahan (*Error Correction Model/ECM*) guna menganalisis

keseimbangan pengaruh variabel ekonomi makro terhadap penerimaan pajak dalam jangka panjang maupun jangka pendek.

1.2. Rumusan Masalah

Penerimaan pajak memiliki kontribusi yang besar pada sistem penerimaan negara di Indonesia. Tak hanya dari sisi penerimaan negara, penerimaan pajak juga diandalkan sebagai sumber pendanaan utama dalam mendanai total belanja negara sehingga pajak juga memiliki peran strategis terhadap kegiatan pengeluaran pemerintah. Permasalahan terkait target penerimaan pajak yang tidak tercapai kerap terjadi tiap tahunnya. Realisasi penerimaan pajak rata-rata mencapai 96,33 persen dari targetnya selama lima tahun terakhir. Realisasi penerimaan pajak yang lebih rendah dari target yang disusun dapat menjadi masalah yang serius bagi rencana penerimaan dan belanja negara serta pembiayaan anggaran. Kondisi tersebut mengindikasikan perlunya data dan model perencanaan penerimaan pajak yang lebih representatif. Seperti telah disampaikan sebelumnya, penerimaan pajak tidak hanya dapat dipengaruhi oleh variabel mikro, seperti dasar pengenaan pajak dan tingkat pajak, tetapi juga dapat dipengaruhi oleh variabel ekonomi makro, seperti tingkat pertumbuhan ekonomi atau produk domestik bruto riil, tingkat inflasi, nilai tukar mata uang domestik terhadap USD, kondisi hutang luar negeri, dan dapat pula dari sisi kebijakan berupa belanja negara .

Berdasarkan latar belakang dan penjelasan tersebut, maka pada penelitian ini akan diidentifikasi bagaimanakah karakteristik perkembangan penerimaan pajak, serta variabel ekonomi makro yang diperkirakan menentukan penerimaan pajak,

antara lain produk domestik bruto (PDB) riil, tingkat inflasi, nilai tukar rupiah terhadap USD, serta belanja negara. Pada penelitian ini juga dianalisis bagaimanakah pengaruh dinamika variabel-variabel ekonomi makro tersebut terhadap penerimaan pajak Indonesia dalam jangka panjang maupun jangka pendek. Berdasarkan rumusan masalah tersebut dapat disusun pertanyaan penelitian berupa:

1. Bagaimana perkembangan kondisi penerimaan pajak, produk domestik bruto riil, tingkat inflasi, nilai tukar rupiah terhadap USD, serta belanja negara di Indonesia?
2. Bagaimana pengaruh dinamika produk domestik bruto riil, tingkat inflasi, nilai tukar rupiah terhadap USD, serta belanja negara terhadap penerimaan pajak Indonesia dalam jangka panjang dan jangka pendek?

1.3. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh variabel ekonomi makro terhadap besarnya penerimaan pajak di Indonesia. Secara khusus, tujuan penelitian ini adalah :

1. Mengidentifikasi kondisi perkembangan penerimaan pajak, produk domestik bruto riil, tingkat inflasi, nilai tukar rupiah terhadap USD, serta belanja negara di Indonesia,
2. Menganalisis pengaruh produk domestik bruto riil, tingkat inflasi, nilai tukar rupiah terhadap USD, serta belanja negara terhadap penerimaan pajak dalam jangka panjang dan jangka pendek di Indonesia.

Untuk mengestimasi dinamika jangka panjang dan jangka pendek, penelitian ini menggunakan model koreksi kesalahan (ECM) untuk menganalisis perbedaan efek jangka panjang dan jangka pendek pada model penerimaan pajak.

Selain tujuan tersebut, penelitian ini juga diharapkan memiliki kegunaan bagi bidang akademik maupun bagi pemerintah. Pada bidang akademik, penelitian ini diharapkan dapat berkontribusi dalam pengembangan dan penerapan aplikasi teori ekonomi dan keuangan publik, khususnya mengenai teori yang terkait dengan penerimaan pemerintah dan penerimaan pajak. Penelitian ini nantinya juga diharapkan dapat menjadi salah satu referensi dan masukan bagi penelitian selanjutnya. Bagi pemerintah penelitian ini diharapkan dapat berguna dan menjadi masukan dalam penyusunan kebijakan yang terkait dengan perpajakan, khususnya kebijakan yang bertujuan untuk mengoptimalkan penerimaan pajak.

1.4. Sistematika Penulisan

Penulisan laporan penelitian ini terdiri dari 5 bagian. Bab 1 merupakan bagian pendahuluan yang menjelaskan latar belakang permasalahan, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, serta sistematika penulisan. Pada bab ini juga dijelaskan kondisi sumber-sumber penerimaan negara, dan permasalahan yang terkait dengan penerimaan pajak.

Bab 2 merupakan bagian tinjauan pustaka yang terdiri dari landasan teori, tinjauan pustaka, kerangka pemikiran, dan hipotesis penelitian. Landasan teori dimulai dengan pemaparan peran dan fungsi sektor publik atau peran pemerintah dalam perekonomian. Penjelasan selanjutnya terkait dengan pajak sebagai sumber

utama penerimaan pemerintah, dimana pada subbagian tersebut dijelaskan juga struktur tarif pajak. Selain itu juga dijelaskan bagaimana variabel-variabel ekonomi makro dapat mempengaruhi penerimaan pajak. Pada bab ini juga dicantumkan penelitian-penelitian terdahulu di beberapa negara yang terkait dengan penelitian yang dilakukan, serta hipotesis penelitian.

Bab 3 merupakan bagian metode penelitian. Pada bab ini dibangun model analisis *Error Correction Model* yang digunakan dalam penelitian ini. Selain itu dalam bab ini juga diuraikan variabel-variabel penelitian yang digunakan, jenis dan sumber data.

Bab 4 merupakan bagian hasil dan pembahasan. Pada bab ini dianalisis perkembangan data penerimaan pajak, serta variabel independen lainnya sejak tahun 1976 hingga tahun 2013. Pada bab ini juga dicantumkan hasil estimasi pada model yang telah dibangun dan analisis hasil estimasi tersebut.

Bab 5 merupakan penutup. Bab ini terdiri dari simpulan hasil penelitian, saran, dan keterbatasan penelitian. Pada bab ini juga disampaikan masukan untuk penelitian selanjutnya dengan topik sejenis

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Landasan Teori

2.1.1. Peran Pemerintah dalam Perekonomian

Pembangunan merupakan tujuan utama yang harus dilakukan oleh suatu negara, khususnya bagi negara yang masih tergolong sebagai negara berkembang dengan karakteristik perekonomian yang lemah, serta memiliki tingkat kemiskinan dan ketimpangan yang tinggi. Menurut Todaro dan Smith (2006) terdapat tiga tujuan inti dilakukannya pembangunan. Pertama pembangunan dilakukan sebagai peningkatan ketersediaan dan perluasan distribusi barang kebutuhan hidup pokok, seperti pangan, sandang, papan, kesehatan dan keamanan. Tujuan kedua adalah sebagai peningkatan standar hidup, baik peningkatan pendapatan, penambahan penyediaan lapangan kerja, perbaikan kualitas pendidikan, dan lainnya yang dapat memperbaiki kesejahteraan materiil dan menumbuhkan harga diri pada pribadi dan bangsa yang bersangkutan. Tujuan ketiga adalah perluasan pilihan-pilihan ekonomis dan sosial bagi setiap individu serta bangsa.

Untuk mencapai tujuan pembangunan, khususnya dalam bidang perekonomian, yaitu untuk mencapai kesejahteraan masyarakat tidak dapat hanya mengandalkan peran perusahaan-perusahaan swasta (sektor swasta) saja tetapi juga diperlukan peran sektor publik (pemerintah). Hal tersebut karena sektor swasta, termasuk rumah tangga, perusahaan, dan luar negeri tidak dapat mengatasi seluruh

permasalahan perekonomian, seperti permasalahan dalam penyediaan barang publik, persaingan antar perusahaan, serta distribusi pendapatan.

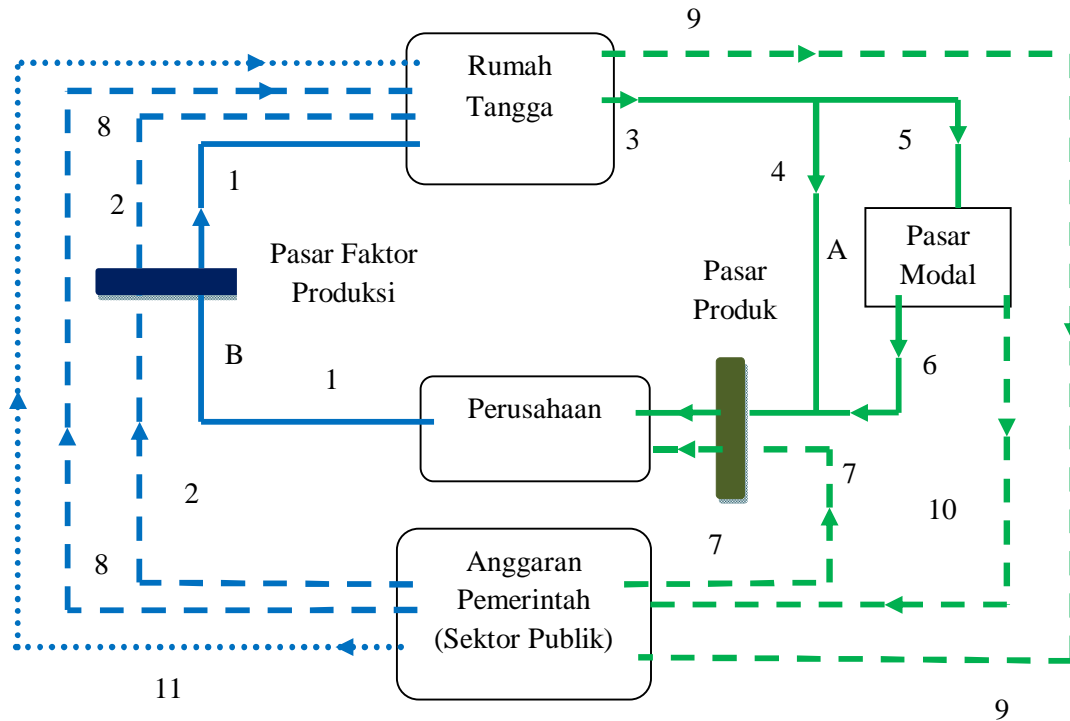
Hubungan antara sektor swasta dengan sektor pemerintah secara sederhana dapat diilustrasikan dalam aliran sirkuler (arus melingkar) dari pendapatan dan pengeluaran (Musgrave dan Musgrave, 1989) seperti yang ditampilkan dalam Gambar 2.1. Jika diasumsikan dalam perekonomian hanya terdiri dari perusahaan dan rumah tangga dengan mengikuti arah jarum jam, dapat dilihat aktivitas antara perusahaan dan rumah tangga. Rumah tangga akan memperoleh pendapatan melalui penjualan faktor-faktor produksi pada pasar faktor produksi (garis 1). Pendapatan yang diperoleh tersebut kemudian digunakan untuk konsumsi (garis 4) atau ditabung (garis 5). Jika terdapat porsi pendapatan yang ditabung, tabungan selanjutnya akan membiayai pengeluaran investasi (garis 6)¹. Garis 4 dan garis 6 merupakan gabungan dari pembelian produk di Pasar produk yang akan meningkatkan penerimaan perusahaan yang nantinya akan digunakan lagi untuk membeli faktor produksi.

Kemudian jika sektor pemerintah dimasukkan dalam perekonomian, faktor-faktor produksi tidak hanya dibeli oleh sektor swasta saja, tetapi juga dibeli oleh sektor pemerintah (garis 2). Pemerintah juga membeli output yang dihasilkan oleh perusahaan swasta (garis 7). Selain melakukan konsumsi faktor produksi dan output, pemerintah juga melakukan pembayaran tunjangan (garis 8). Selanjutnya pemerintah untuk melakukan konsumsi dan pembayaran tunjangan memerlukan penerimaan yang diperoleh dari pajak (garis 9) dan pinjaman (garis 10). Berdasarkan Gambar 2.1,

¹ Pada hal ini diasumsikan tabungan sama dengan investasi.

dapat dilihat bahwa terdapat hubungan yang erat antara sektor swasta dan sektor pemerintah.

Gambar 2.1
Aliran Dana Sektor Publik dalam Perekonomian



— : Arus pendapatan dan pengeluaran pada sektor swasta

- - - : Arus pendapatan dan pengeluaran pada sektor pemerintah

Sumber: diadaptasi dari Musgrave dan Musgrave (1989)

Dalam perekonomian, peran utama pemerintah secara umum menyangkut pengaturan sektor privat, serta sebagai penyedia barang publik (Eckstein, 1964). Menurut Smith (dalam Mangkoesobroto, 1994) pemerintah suatu negara memiliki tiga fungsi utama dalam bernegara, yaitu untuk memelihara keamanan dalam negeri dan pertahanan, untuk menyelenggarakan peradilan, serta untuk menyediakan barang-

barang yang tidak disediakan oleh pihak swasta, seperti jalan raya, dam, dan jembatan. Campur tangan pemerintah juga dapat dilakukan melalui pembuatan kebijakan-kebijakan yang dimaksudkan untuk membimbing, mengawasi, memberi koreksi, dan melengkapi hal-hal tertentu dari mekanisme pasar (Musgrave dan Musgrave, 1989).

Menurut Musgrave dan Musgrave (1989) sektor publik atau pemerintah memiliki tiga fungsi utama pada perekonomian, yaitu :

1. Fungsi alokasi. Pemerintah berfungsi membantu pasar untuk mengalokasikan barang dan jasa secara efisien. Hal tersebut karena pasar tidak mampu untuk mengalokasikan barang dan jasa secara efisien. Hal tersebut biasa disebut kegagalan pasar (*market failure*). Bentuk kegagalan pasar antara lain adanya eksternalitas, barang publik, informasi yang tidak sempurna (*Assymetric Information*), serta bentuk pasar yang tidak sempurna. Pemerintah perlu melakukan alokasi anggaran guna mengatasi permasalahan tersebut, baik sisi pengeluaran yang dibutuhkan untuk menyediakan berbagai barang publik tersebut maupun sisi pendapatan yang didapat dari pembebanan pajak.
2. Fungsi Distribusi. Pemerintah melakukan redistribusi pendapatan antara rumah tangga berpendapatan tinggi dan rumah tangga berpendapatan rendah. Redistribusi tersebut dapat dilakukan dengan skema transfer pajak yang mengombinasikan antara pembebanan pajak progresif bagi yang berpendapatan tinggi dengan pemberian subsidi bagi yang berpendapatan

rendah. Selain itu dapat juga dengan pemberlakuan pajak progresif yang nantinya pendapatan pajak tersebut digunakan untuk mendanai jasa publik yang secara khusus dimanfaatkan bagi rumah tangga berpendapatan rendah.

3. Fungsi Stabilisasi. Pemerintah memiliki fungsi untuk menjaga stabilitas makro perekonomian, seperti kesempatan kerja yang tinggi, stabilitas derajat tingkat harga, kondisi neraca luar negeri yang sehat, dan tingkat pertumbuhan ekonomi dengan mengeluarkan kebijakan stabilisasi.

Selain tiga fungsi utama yang dikemukakan oleh Musgrave dan Musgrave di atas, Due (1963) juga menambahkan satu fungsi yang mendasari aktivitas pemerintah, yaitu fungsi komersial. Pada fungsi komersial disebutkan bahwa suatu barang atau jasa akan lebih efisien jika diproduksi atau disediakan oleh pemerintah. Hal tersebut karena barang atau jasa yang disediakan oleh pemerintah tidak dikenakan ongkos, sehingga tidak ada biaya tambahan untuk pengumpulan ongkos tersebut. Berbeda dengan barang dan jasa yang disediakan oleh perusahaan swasta yang pada umumnya dikenakan ongkos.

Terkait fungsi pemerintah, Stiglitz (2000) juga menjelaskan mengenai aktivitas pemerintah dalam perekonomian yang dibagi menjadi empat kategori. Pertama, aktivitas produksi barang dan jasa yaitu pemerintah melakukan produksi dan sebagai penyedia pendidikan publik, listrik, air, jasa pos, dan mencetak uang. Kedua, aktivitas pengaturan dan subsidi terhadap sektor dan produk privat. Pemerintah melakukan pemberian subsidi, dan pembebanan pajak bagi perusahaan swasta, serta melakukan regulasi atas kegiatan perusahaan, seperti kekuatan monopoli,

eksternalitas negatif yang ditimbulkan, pemberlakuan tarif impor, serta subsidi ekspor. Ketiga, aktivitas pembelian barang dan jasa yang dilakukan untuk menyediakan jasa publik, seperti pembelian beton untuk membangun jembatan. Keempat, aktivitas redistribusi pendapatan yang dilakukan dengan cara *transfer payment*.

Dalam menjalankan fungsi dan aktivitasnya, pemerintah melakukan kegiatan pengeluaran guna membiayai semua aktivitasnya. Dana pengeluaran pemerintah tersebut dapat dipenuhi dari pendapatan negara. Pendapatan negara merupakan dana yang diperoleh pemerintah yang berasal dari berbagai sumber, baik dalam bentuk penerimaan maupun hutang, dan digunakan untuk mendanai seluruh pengeluaran dan belanja pemerintah. Penerimaan pemerintah dapat diperoleh dari berbagai sumber, seperti dari pihak swasta (perusahaan maupun rumah tangga), dan dapat pula berasal dari tingkat pemerintahan lainnya.

Pada umumnya penerimaan pemerintah dapat dibedakan menjadi dua jenis, yaitu penerimaan pajak dan penerimaan bukan pajak (Mangkoesebroto, 2001). Penerimaan bukan pajak diperoleh dari berbagai sumber selain pengumpulan pajak, seperti; pinjaman pemerintah baik dalam maupun luar negeri, perusahaan-perusahaan milik pemerintah, penerimaan dari hasil lelang, pemberian dari tingkat pemerintah lainnya, serta penerimaan dari biaya layanan administrasi. Penerimaan pajak berasal dari pungutan yang merupakan hak prerogatif pemerintah dengan berdasarkan undang-undang, sehingga dapat dipaksakan dengan tanpa balas jasa langsung.

2.1.2. Pajak sebagai Sumber Utama Penerimaan Pemerintah

Jika dibandingkan tiap jenis penerimaan pemerintah, pengeluaran pemerintah mayoritas dipenuhi oleh penerimaan yang berasal dari penerimaan pajak (Poole, 1956). Kegiatan pajak dilakukan oleh pemerintah dengan cara membebankan pajak bagi masyarakat dan sektor privat (Rosen, 2002). Dalam bukunya, Hyman (2011) menyebutkan bahwa pengumpulan pendapatan yang berasal dari pajak tersebut nantinya digunakan untuk membeli kebutuhan input guna memproduksi barang dan jasa publik (yang disediakan pemerintah) dan untuk mendistribusi daya beli di antara warga negara.

Menurut Sommerfeld, Anderson, dan Brock (dalam Direktorat Penyusunan APBN, 2014) pajak merupakan suatu pengalihan sumber dari sektor swasta ke sektor pemerintah, bukan akibat pelanggaran hukum, serta dilaksanakan dan berdasarkan ketentuan yang telah ditetapkan lebih dahulu, tanpa mendapatkan imbalan langsung dan proporsional, agar pemerintah dapat melaksanakan tugas-tugasnya untuk menjalankan pemerintahan. Pajak juga dapat didefinisikan sebagai iuran wajib yang dibayarkan oleh masyarakat kepada pemerintah berdasarkan undang-undang dengan kontra prestasi tidak langsung. Berdasarkan definisi tersebut, pajak mengandung empat unsur yang mendasari sifat pajak, yaitu pajak dipungut berdasarkan Undang-undang, tidak mendapatkan jasa timbal balik (kontra prestasi perseorangan) yang dapat ditujukan secara langsung, pemungutan pajak diperuntukkan bagi keperluan pendanaan umum pemerintah dalam rangka menjalankan fungsi pemerintah, dan pemungutan pajak dapat dipaksakan (Direktorat Penyusunan APBN, 2014).

Secara umum, pajak terdiri dari dua komponen, yaitu dasar pajak atau objek pajak (*tax base*) dan tarif pajak (*tax rate*). Objek pajak merupakan segala sesuatu yang dijadikan sebagai dasar pengenaan pajak. Objek pajak ditentukan berdasarkan jenis pajak yang dibebankan, seperti untuk pajak penghasilan dasar pengenaan pajaknya adalah pendapatan atau kekayaan, pajak pertambahan nilai dengan dasar pengenaan pajaknya konsumsi, dan lainnya. Tarif pajak merupakan besarnya pajak yang ditarik atas objek pajak yang telah ditentukan menurut perundang-undangan.

Berdasarkan dua komponen tersebut, penerimaan pajak menurut Suparmoko (1987) dapat dihitung dengan mengalikan besarnya objek pajak dengan tarif pajak yang telah ditentukan. Secara matematis penerimaan pajak dapat ditulis sebagai berikut:

$$TR = B \times R \quad [2.1]$$

Dimana TR merupakan penerimaan pajak, B merupakan objek pajak, dan R merupakan tarif pajak.

Menurut Hyman (2011) struktur tarif pajak merupakan hubungan antara pengumpulan pajak selama periode perhitungan tertentu dengan objek pajak. Pada evaluasi pajak, tarif pajak dihitung sebagai rasio pajak yang dibayarkan dengan berbagai nilai dasarnya. Pada perhitungan tarif pajak, terdapat dua konsep perhitungan, yaitu tarif pajak rata-rata dan tarif pajak marjinal. Tarif pajak rata-rata (*Average Tax Rate* atau ATR) merupakan jumlah uang keseluruhan dari pengumpulan pajak dibagi dengan nilai uang dari dasar pajak atau dapat ditulis:

$$ATR = \frac{\text{Total pajak yang dibayarkan}}{\text{Nilai dari objek pajak}} \quad [2.2]$$

Sedangkan tarif pajak marjinal (*Marginal Tax Rate* atau MTR) merupakan rasio antara pertambahan pajak yang dikumpulkan terhadap pertambahan nilai objek pajak sebagai peningkatan objek pajak atau dapat ditulis sebagai berikut:

$$MTR = \frac{\Delta \text{Total pajak yang dibayarkan}}{\Delta \text{Nilai dari objek pajak}} \quad [2.3]$$

Dalam sistem pajak terdapat dua struktur tarif pajak, yaitu struktur tarif pajak *lump sum* dan struktur tarif pajak *ad valorem*. Tarif pajak *lump sum*, merupakan tarif pajak yang jumlah tetap yang seseorang bayar per tahun, tidak tergantung oleh pendapatan seseorang, konsumsi barang dan jasa, atau kekayaan (Hyman, 2011). Sedangkan tarif pajak *ad valorem*, dimana tarif pajak dikenakan berdasarkan angka persentase tertentu dari nilai objek pajak. Struktur tarif pajak *ad valorem* terdiri dari struktur pajak proporsional, progresif, dan regresif.

Struktur pajak proporsional merupakan struktur tarif pajak dimana persentase nilai pengenaan pajak tidak berbeda dengan nilai objek pajak. Pada struktur ini, tarif pajak yang berlaku tidak mempertimbangkan besarnya dasar pengenaan pajak. Sebagai contoh pada pajak penghasilan, berapa pun penghasilan yang diperoleh untuk tiap individu besarnya pajak yang ditarik dari setiap individu tersebut memiliki persentase yang sama misalnya sebesar 10 persen. Pada struktur ini besarnya tarif pajak rata-rata sama dengan tarif pajak marjinal. Struktur tarif pajak progresif merupakan struktur tarif pajak dimana ATR meningkat dengan ukuran dasar pengenaan pajak. Jika ukuran pengenaan pajak meningkat, maka tarif pajak yang

dibebankan juga akan meningkat. Objek pajak yang besar nantinya akan berimplikasi pada besarnya nilai tarif pajak rata-rata. Pada struktur pajak ini tarif pajak rata-rata lebih rendah daripada tarif pajak marjinal. Sedangkan struktur pajak regresif merupakan struktur pajak dimana ATR mengalami penurunan karena peningkatan ukuran dasar pengenaan pajak. Pada struktur pajak regresif, MTR lebih rendah daripada ATR. Pajak penghasilan regresif menghasilkan ATR tahunan yang lebih rendah karena peningkatan penghasilan.

Tarif pajak dapat memengaruhi besarnya penerimaan pajak. Pemerintah dapat menentukan dan membuat kebijakan terkait tarif pajak guna meningkatkan penerimaan pemerintah dari sisi pajak. Tarif pajak berpengaruh positif terhadap penerimaan pajak. Ketika pemerintah meningkatkan tarif pajak, pada umumnya penerimaan pajak juga akan meningkat.

Komponen pajak lainnya adalah dasar pengenaan pajak. Dasar pengenaan pajak merupakan barang atau aktivitas ekonomi yang dibebankan pajak (Hyman, 2011). Pada umumnya dasar pajak dapat dikelompokkan menjadi tiga kategori, yaitu pendapatan, konsumsi, dan kekayaan. Pendapatan merupakan hasil penjumlahan antara konsumsi dan tabungan seseorang. Pendapatan biasanya dijadikan sebagai indikator yang baik guna mengetahui kemampuan individu dalam membayar pajak. Konsumsi merupakan porsi pendapatan yang tidak ditabungkan atau dapat dikatakan sebagai selisih antara pendapatan dan tabungan. Sedangkan kekayaan merupakan nilai dari akumulasi kepemilikan harta seseorang, baik dalam bentuk tabungan maupun dalam bentuk investasi. Dasar pengenaan pajak dapat mempengaruhi

penerimaan pajak secara positif. Jika nilai dasar pengenaan pajak meningkat, maka jumlah yang ditarik dari objek pajak tersebut akan meningkat dan nantinya juga akan meningkatkan penerimaan pajak.

2.1.3. Pengaruh Kondisi Perekonomian terhadap Penerimaan Pajak

Selain dipengaruhi oleh komponen pajak, perkembangan penerimaan pajak di suatu negara dapat dipengaruhi oleh karakteristik perekonomian negara tersebut. Penerimaan pajak di negara sedang berkembang akan cenderung lebih kecil jika dibandingkan dengan penerimaan pajak di Negara yang memiliki karakteristik perekonomian modern (Musgrave dan Musgrave, 1989). Salah satu penyebab rendahnya penerimaan pajak di negara sedang berkembang karena kurang memadainya dasar pengenaan pajak yang terdapat di Negara tersebut. Kondisi tersebut berbeda dengan negara maju, dimana pada negara maju dasar pengenaan pajak lebih memadai. Selain itu, rendahnya penerimaan pajak yang diperoleh pemerintah juga dikarenakan administrasi pengumpulan dan pengelolaan pajak di negara sedang berkembang belum sebaik administrasi pengumpulan pajak di negara dengan perekonomian modern.

Todaro dan Smith (2006) menyebutkan secara lebih luas besarnya potensi pajak di suatu negara menurut juga dapat ditentukan oleh lima faktor pokok. Pertama, tingkat pendapatan riil per kapita. Kedua, tingkat ketimpangan distribusi pendapatan riil pada penduduk. Ketiga, kekokohan struktur sektor-sektor perindustrian dalam perekonomian secara keseluruhan, serta keandalan dari setiap jenis kegiatan ekonomi yang berlangsung. Keempat, tatanan dan keandalan pada bidang kelembagaan sosial

dan politik, serta kelompok-kelompok yang memiliki kekuatan. Kelima, kemampuan kelembagaan dan aparat administrasi, khususnya dalam lembaga birokrasi pajak.

Pengaruh kondisi perekonomian terhadap perubahan penerimaan pajak juga dapat dilihat dari kondisi variabel-variabel ekonomi makro, seperti; pertumbuhan ekonomi, tingkat inflasi, nilai tukar, dan variabel ekonomi makro lainnya. Berikut akan dijelaskan mekanisme pengaruh tiap variabel ekonomi makro terhadap penerimaan pajak.

2.1.3. 1. Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi terhadap Penerimaan Pajak

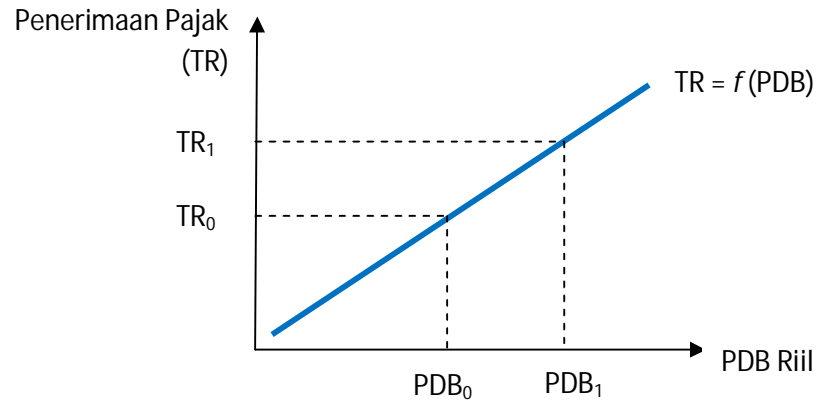
Salah satu variabel ekonomi makro yang dapat mempengaruhi fluktuasi penerimaan pajak adalah variabel pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi dapat mempengaruhi penerimaan pajak melalui nilai riil dari dasar pengenaan pajak dan pola konsumsi individu (Karran, 1985). Jika pertumbuhan ekonomi suatu negara meningkat, nilai riil dari dasar pengenaan pajak juga akan meningkat. Peningkatan nilai riil dari dasar pengenaan pajak akan menyebabkan pajak yang ditarik dari objek pajak tersebut meningkat, sehingga penerimaan pajak yang diperoleh pemerintah juga akan meningkat.

Selain itu pertumbuhan ekonomi juga memiliki efek yang signifikan terhadap perubahan pola konsumsi individu. Jika pertumbuhan ekonomi tinggi, pendapatan atau upah individu juga akan meningkat. Peningkatan pendapatan tersebut dapat membuat pola konsumsi individu terhadap suatu barang berubah, dan kemudian dapat meningkatkan penarikan pajak jenis tertentu. Hubungan antara pertumbuhan ekonomi dengan penerimaan pajak diilustrasikan oleh Karran (1985) dengan pembelian mobil.

Ketika pertumbuhan ekonomi meningkat, kepemilikan mobil juga akan meningkat, sehingga jumlah surat izin mobil pribadi juga akan meningkat. Sebagai akibatnya penarikan pajak atas surat izin kepemilikan mobil meningkat dan penerimaan pajak dari kendaraan bermotor juga akan meningkat.

Parkin (2008) menjelaskan bahwa jumlah pajak yang dibayarkan tergantung pada tarif pajak dan pendapatan. Pendapatan tersebut dapat berubah sesuai dengan perubahan PDB riil sehingga besarnya penerimaan pajak juga tergantung pada PDB riil (Parkin, 2008). Ketika PDB riil mengalami peningkatan pada saat ekspansi, upah dan keuntungan juga akan meningkat, sehingga penerimaan pajak juga akan mengalami peningkatan. Begitupun sebaliknya, penurunan PDB riil pada saat depresi akan menyebabkan upah dan keuntungan menurun. Penurunan upah dan keuntungan tersebut akhirnya akan berpengaruh terhadap penurunan penerimaan pajak. Gambar 2.2 memperlihatkan bahwa kurva yang menunjukkan hubungan antara PDB riil dengan penerimaan pajak memiliki kemiringan positif. Hal tersebut karena beberapa komponen penerimaan pajak meningkat karena peningkatan PDB riil.

Gambar 2.2. Kurva Hubungan PDB Riil dan Penerimaan Pajak



Sumber: diadaptasi dari Parkin (2008)

Selain pertumbuhan ekonomi, kebijakan pemerintah dalam perekonomian, seperti kebijakan perubahan nilai tukar riil, tingkat inflasi, derajat pembatasan impor, tingkat hutang publik, dan tingkat suku bunga juga dapat mempengaruhi besarnya penerimaan pajak (Tanzi, 1987).

2.1.3.2. Pengaruh Inflasi terhadap Penerimaan Pajak

Inflasi dapat meningkatkan penerimaan pajak karena inflasi akan menyebabkan nilai nominal dari uang (termasuk pendapatan yang kena pajak) meningkat, sehingga pajak yang ditarik dari pendapatan tersebut juga akan meningkat (Karran, 1985). Inflasi akan meningkatkan penerimaan pajak jika pajak yang dibebankan atas suatu objek dalam bentuk persentase dari nilai objek pajak tersebut. Menurut Tanzi (1989) jika suatu negara sangat bergantung terhadap pengumpulan pajak penghasilan dengan tarif progresif dan tidak dimasukkan pada sumber, dan jika percepatan laju inflasi sedang, negara akan mengalami inflasi yang nantinya

meningkatkan penerimaan pajak. Tetapi inflasi juga dapat berdampak negatif terhadap penerimaan pajak. Peningkatan inflasi akan menurunkan penerimaan pajak jika pajak yang dibebankan atas suatu objek dalam bentuk jumlah uang tetap (*lump sum taxes*).

Tingkat inflasi dapat diperoleh atas kontribusi pemerintah melalui kegiatan penciptaan uang yang digunakan untuk mendanai sebagian pengeluarannya. Tingkat inflasi yang diperoleh tersebut nantinya dapat mempengaruhi penerimaan pajak melalui jalan yang berbeda. Menurut Tanzi (1989) inflasi memiliki pengaruh negatif terhadap penerimaan pajak riil di negara berkembang dengan karakteristik pengumpulan pajak penghasilan progresif dengan sistem *pay-as-you-go* dinilai tidak penting, pajak spesifik memainkan peran yang signifikan, dan jarak waktu pengumpulan pajak secara umum cukup besar. Adanya jarak waktu pengumpulan untuk semua pembayaran pajak menurut Tanzi (1989) mengimplikasikan bahwa di bawah kondisi inflasi, kemungkinan terdapat penerimaan riil pemerintah yang hilang. Penerimaan riil pemerintah yang hilang tersebut merupakan fungsi langsung dari tingkat inflasi, ukuran jarak waktu (*the size of lag*), dan tingkat awal pajak yang dinyatakan sebagai bagian dari PDB atau dapat ditulis:

$$TR\ loss = f(lag\ pengumpulan, tingkat\ inflasi, tingkat\ awal\ perpajakan)$$

Dimana TR loss merupakan penerimaan pajak yang hilang. Semakin panjang jarak waktu pengumpulan dan semakin tinggi tingkat inflasi akan menyebabkan semakin besarnya persentase penurunan dalam tingkat pajak sebelum inflasi. Dengan

asumsi elastisitas sistem pajak uniter, pengaruh inflasi terhadap beban pajak dapat dihitung dengan persamaan berikut:

$$T^\pi = \frac{T_0}{(1+p)^n} = \frac{T_0}{(1+\pi)^{n/12}} \quad [2.4]$$

Dimana T_0 merupakan rasio penerimaan pajak terhadap PDB dengan inflasi nol, T^π merupakan rasio penerimaan pajak terhadap PDB ketika tingkat inflasi sebesar π , n adalah jarak waktu pengumpulan, p dan π merupakan tingkat inflasi bulanan dan tahunan.

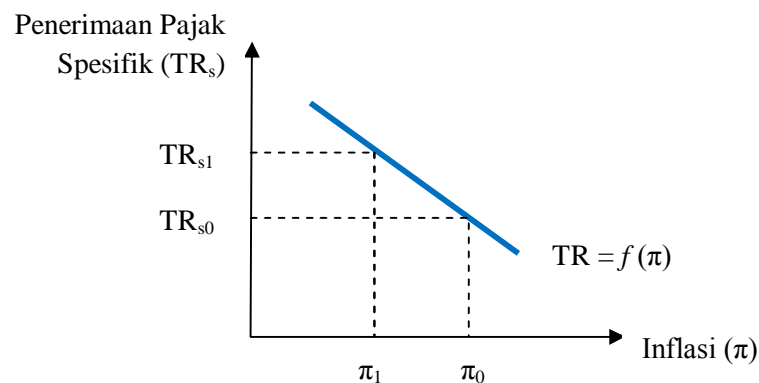
Jarak waktu pengumpulan, tingkat inflasi, serta tingkat awal pajak memiliki pengaruh positif terhadap penerimaan pajak yang hilang. Negara dengan kondisi rata-rata jarak waktu yang panjang untuk seluruh sistem, tingkat inflasi yang tinggi, dan tingkat awal pajak yang juga tinggi akan menyebabkan penerimaan absolut yang hilang (diukur sebagai proporsi PDB) menjadi sangat tinggi. Tingginya penerimaan absolut yang hilang menyebabkan total penerimaan pajak yang diterima pemerintah mengalami penurunan. Berdasarkan uraian tersebut dapat diperoleh bahwa tingkat inflasi memiliki pengaruh negatif terhadap penerimaan pajak yang diterima oleh Pemerintah.

Dalam Tanzi (1989) disebutkan bahwa tingkat penerimaan pajak juga dipengaruhi oleh kebijakan inflasi. Hal tersebut karena beberapa pajak cukai penting (tembakau, alkohol, dan bahan bakar) dan bea impor dibebankan dalam tarif spesifik. Hal tersebut karena tarif spesifik sering tidak disesuaikan dengan perubahan inflasi.

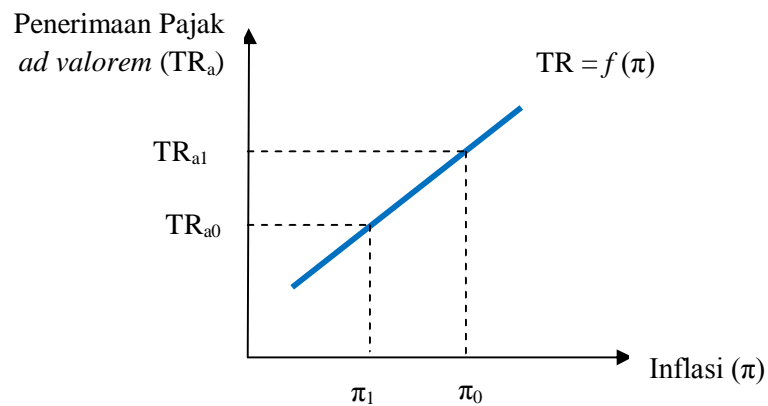
Ketika terjadi inflasi, tarif spesifik akan tetap sehingga Pemerintah akan mengalami kehilangan pendapatan ketika harga meningkat. Hal tersebut karena peningkatan harga akan menurunkan jumlah barang yang diminta. Penurunan jumlah barang yang diminta akan menyebabkan pajak yang ditarik menjadi lebih sedikit, sehingga penerimaan pajak juga akan berkurang.

Berdasarkan penjelasan di atas, hubungan antara tingkat inflasi dan penerimaan pajak dapat diilustrasikan pada Gambar 2.3. Gambar 2.3 (a) menunjukkan bahwa terdapat hubungan negatif antara tingkat inflasi dan penerimaan pajak spesifik. Hal tersebut dapat dilihat dari kemiringan kurva yang menurun. Tingkat inflasi yang tinggi akan berimplikasi pada penurunan penerimaan pajak spesifik, begitupun sebaliknya. Gambar 2.3 (b) menunjukkan hubungan positif antara perubahan tingkat inflasi dan penerimaan pajak *ad valorem*. Hal tersebut dapat dilihat dari kemiringan kurva yang menaik.

Gambar 2.3. Kurva Hubungan Tingkat Inflasi dan Penerimaan Pajak



(a)



(b)

Sumber: Sintesis Penulis

2.1.3. 3. Pengaruh Nilai Tukar terhadap Penerimaan Pajak

Menurut Tanzi (1989) kebijakan ekonomi di beberapa negara berkembang yang telah diobservasi sering menunjukkan hubungan negatif antara penerimaan pajak suatu negara dan tingkat riil nilai tukar resmi. Penguatan yang terjadi pada nilai tukar resmi riil (nilai mata uang domestik per unit mata uang asing mengalami penurunan) akan menyebabkan penurunan pada rasio pajak terhadap PDB. Dalam tulisannya, Tanzi (1989) menyebutkan bahwa hubungan negatif antara penerimaan pajak dan tingkat nilai tukar dapat dikaitkan dengan efek langsung penguatan nilai tukar terhadap bea impor, pajak ekspor, serta pajak penjualan dan cukai.

a. Efek terhadap Bea Impor

Hubungan langsung antara nilai tukar riil dan tingkat pajak dapat dilihat melalui hubungan antara tingkat nilai tukar riil dengan dasar pengenaan bea impor yang dihitung. Bea impor pada umumnya dibebankan dalam bentuk pajak *ad*

valorem. Dasar pengenaan pajak ditentukan oleh nilai domestik produk yang diimpor dan diukur dalam nilai tukar resmi. Jika impor terjadi melalui jalur resmi, overvaluasi nilai tukar akan menyebabkan penurunan pada nilai riil impor yang diukur dalam harga domestik. Penurunan nilai riil dari dasar pengenaan pajak tersebut akan menurunkan jumlah pajak yang dibayarkan sehingga penerimaan pajak juga akan mengalami penurunan, begitupun sebaliknya. Jika nilai tukar mengalami *undervaluation*, nilai riil impor yang diukur dalam harga domestik meningkat sehingga jumlah pajak yang dibayarkan juga akan meningkat. Jika suatu negara dengan kondisi valuta asing yang cukup, atau akses hutang luar negeri yang tidak terbatas, atau keduanya, overvaluasi nilai tukar akan berimplikasi pada volume impor yang lebih tinggi.

b. Efek terhadap Pajak Ekspor

Selain melalui bea impor, overvaluasi nilai tukar juga dapat mempengaruhi penerimaan yang berasal dari pajak ekspor. Overvaluasi nilai tukar akan menyebabkan penerimaan dari pajak ekspor mengalami penurunan. Hal tersebut karena pajak ekspor yang dibebankan atas nilai ekspor diukur dalam mata uang domestik. Jika mata uang domestik mengalami overvaluasi atau menguat, harga barang ekspor akan terlihat lebih tinggi di pasar luar negeri, sehingga permintaan barang tersebut akan berkurang. Penurunan volume dasar pengenaan pajak pada pajak ekspor tersebut akan menurunkan penerimaan pajak yang berasal dari pajak ekspor, begitupun sebaliknya. Jika nilai tukar melemah, penerimaan pajak ekspor akan mengalami peningkatan.

c. Efek terhadap Pajak Penjualan dan Cukai

Pada negara berkembang, pemerintah seringkali memberlakukan kebijakan pembatasan impor guna melindungi produk domestik. Kebijakan pembatasan impor dapat dilakukan dengan membebankan pajak penjualan yang tinggi bagi produk impor, sedangkan untuk produk domestik tidak dibebankan pajak atau dibebankan pajak dengan tarif yang rendah. Perbedaan pembebanan pajak penjualan tersebut menyebabkan pajak penjualan lebih banyak dikumpulkan dari kegiatan impor dibandingkan dari kegiatan domestik, sehingga perubahan nilai tukar riil yang terjadi juga akan mempengaruhi penerimaan total pajak penjualan. Jika nilai tukar riil mengalami overvaluasi, pengumpulan pajak yang berasal dari total pajak penjualan dan cukai dalam bentuk riil akan mengalami penurunan. Hal tersebut karena overvaluasi nilai tukar akan menyebabkan turunnya nilai domestik dari produk impor tersebut (Tanzi, 1989).

Selain melalui jalur langsung, overvaluasi nilai tukar juga dapat mempengaruhi penerimaan pajak melalui jalur tidak langsung. Pengaruh overvaluasi nilai tukar terhadap penerimaan pajak secara tidak langsung dapat dijelaskan melalui empat cara. Cara pertama melalui insentif ekspor, dimana overvaluasi nilai tukar akan menurunkan insentif untuk memproduksi barang ekspor dan melakukan ekspor. Penurunan insentif tersebut akan menyebabkan penurunan pada volume ekspor dan penurunan ketersediaan mata uang asing yang dimiliki suatu negara. Keterbatasan valuta asing yang dimiliki tersebut akan mendorong penurunan impor. Akibatnya penerimaan pajak yang berasal dari ekspor, bea impor, serta pajak penjualan dan

cukai mengalami penurunan. Selain itu besarnya penghasilan kena pajak sebagian juga terkait dengan ekspor. Overvaluasi nilai tukar juga akan menyebabkan penghasilan yang kena pajak berkurang, sehingga penerimaan dari pajak penghasilan juga akan mengalami penurunan.

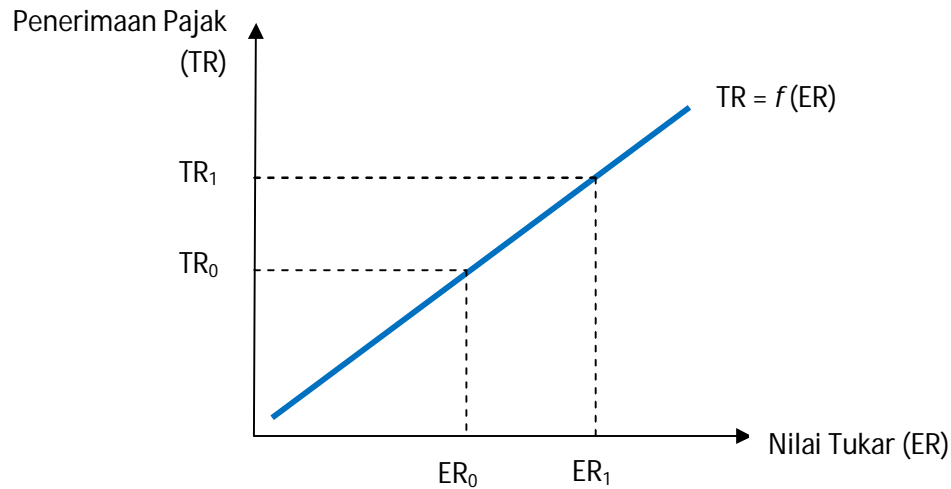
Kedua, overvaluasi nilai tukar akan meningkatkan kemungkinan devaluasi yang besar di masa yang akan datang. Overvaluasi nilai tukar akan menyebabkan individu cenderung mengambil tindakan perlindungan terhadap kemungkinan yang akan terjadi di masa depan. Sikap yang mungkin yang diambil antara lain dengan membawa modal keluar negeri (atau yang biasa disebut *capital flight*) atau dapat juga dengan menyimpan aset keuangan yang dimiliki dalam bentuk dollar di dalam negeri (substitusi mata uang). *Capital flight* dan substitusi mata uang akan mengurangi ketersediaan valuta asing yang digunakan untuk kegiatan impor resmi barang dan jasa, sehingga tindakan yang diambil individu tersebut akan menurunkan dasar pengenaan pajak.

Ketiga, overvaluasi nilai tukar sering menimbulkan pembatasan pada pergerakan barang dan capital, atau akan menyebabkan pada pembatasan yang lebih lanjut. Pembatasan tersebut berhubungan dengan pasar gelap (*black market*) valuta asing dan barang-barang. Keberadaan pasar gelap dalam perekonomian akan menyebabkan penurunan pada tingkat transaksi resmi dan juga menyebabkan perubahan pada dasar pengenaan pajak. Hal tersebut karena barang-barang yang diperjualbelikan di pasar gelap tidak dibebankan pajak, baik bea impor, pajak ekspor, dan pajak penghasilan, sehingga penerimaan pajak akan mengalami penurunan.

Keempat, overvaluasi nilai tukar yang disertai dengan kesulitan pada neraca pembayaran akan mendorong pemerintah untuk membatasi impor barang konsumen manufaktur dan meningkatkan impor bahan baku dan peralatan modal. Hal tersebut karena barang konsumen manufaktur dianggap sebagai barang yang kurang penting, sedangkan bahan baku dan peralatan modal yang dianggap lebih penting. Struktur impor akan berubah mendukung barang dengan bea impor dan pajak penjualan yang rendah atau nol dan melawan pajak penjualan dan bea impor yang tinggi. Perubahan struktur tersebut mengakibatkan penyelundupan barang yang dikenai bea tinggi meningkat, sehingga rasio impor resmi terhadap total impor akan menyusut. Hal tersebut akan menimbulkan kerugian pada bea masuk dan pajak penjualan domestik.

Berdasarkan uraian di atas, hubungan antara nilai tukar dan penerimaan pajak dapat digambarkan pada Gambar 2.4. Kurva hubungan antara nilai tukar riil dengan penerimaan pajak yang memiliki kemiringan positif. Dengan asumsi neraca pembayaran suatu negara dalam kondisi surplus (nilai ekspor lebih besar dari nilai impor), overvaluasi (nilai mata uang domestik per unit mata uang asing mengalami penurunan) nilai tukar riil akan berimplikasi pada penurunan penerimaan pajak. Begitupun sebaliknya, jika nilai tukar riil dalam kondisi *undervaluation* (nilai mata uang domestik per unit mata uang asing meningkat), dengan asumsi neraca pembayaran suatu negara dalam kondisi surplus, penerimaan pajak akan meningkat.

Gambar 2.4. Kurva Hubungan Nilai Tukar Riil dan Penerimaan Pajak



Sumber: Sintesis Penulis

2.1.3. 4. Pengaruh Belanja Negara terhadap Penerimaan Pajak

Sebagai komponen utama kebijakan fiskal, penerimaan dan pengeluaran pemerintah memiliki hubungan kausal antara satu dengan yang lainnya. Arah hubungan antara penerimaan dan pengeluaran pemerintah menjadi perdebatan dalam teori ekonomi publik. Oleh karena itu, dalam menjelaskan hubungan kausal antara penerimaan dan pengeluaran pemerintah terdapat empat hipotesis umum yang biasa digunakan, yaitu hipotesis penerimaan pajak-pengeluaran (*tax-spend hypothesis*), hipotesis sinkronisasi fiskal (*synchronization fiscal hypothesis*), hipotesis pemisahan kelembagaan (*institutional separation hypothesis*), serta hipotesis pengeluaran-penerimaan pajak (*spend-tax hypothesis*).

Pada hipotesis penerimaan pajak-pengeluaran, Friedman (dalam Aisha dan Khatoun, 2009) menjelaskan bahwa tingkat pengeluaran menyesuaikan dengan tingkat pajak yang tersedia dan memiliki kausalitas dengan arah dari pajak ke

pengeluaran. Friedman menyebutkan bahwa hubungan antara pengeluaran pemerintah dan pajak adalah positif. Jika penerimaan pajak ditingkatkan pengeluaran pemerintah juga akan meningkat, begitupun sebaliknya. Buchanan dan Wagner, serta Niskanen (dalam Aisha dan Khatoun, 2009) juga mendukung hipotesis penerimaan pajak-pengeluaran, tetapi berbeda dengan Friedman, mereka menjelaskan bahwa hubungan antara pengeluaran pemerintah federal dan penerimaan pajak adalah negatif.

Hipotesis sinkronisasi fiskal mempostulatkan pemerintah mengambil keputusan atas pajak dan pengeluaran secara simultan dan keduanya mengalami perubahan secara bersama-sama serta menunjukkan kausalitas dua arah (Aisha dan Khatoun, 2009). Menurut Musgrave (dalam Aisha dan Khatoun, 2009) sisi pengeluaran dan pajak dalam anggaran harus ditentukan secara bersama-sama guna memaksimalkan fungsi kesejahteraan sosial antarwaktu masyarakat. Hipotesis ini juga menunjukkan adanya hubungan kausalitas dua arah antara pengeluaran dan penerimaan pajak. Hal tersebut karena pengeluaran pemerintah dan penerimaan pajak saling menentukan satu sama lain secara simultan.

Hipotesis pemisahan kelembagaan menyebutkan tidak terdapat hubungan antara penerimaan pajak dan pengeluaran pemerintah. Setiap tingkat kelembagaan yang berbeda memiliki fungsi belanja dan pajak yang berbeda, sehingga setiap lembaga memiliki keputusan yang independen terkait dengan pengeluaran dan penerimaan. Ketidakadaan hubungan antar variabel kebijakan fiskal tersebut menurut Hoover dan Sheffrin (dalam Aisha dan Khatoun, 2009) dikarenakan beberapa pelaku

penting memiliki agenda dan kepentingan yang berbeda sehingga penentuan besarnya pengeluaran dan penerimaan ditentukan secara independen.

Hipotesis pengeluaran-penerimaan pajak menjelaskan bahwa pemerintah lebih dulu melakukan belanja dibandingkan dengan mengeluarkan kebijakan terkait pajak, selanjutnya penerimaan disesuaikan guna mengakomodasi tingkat pengeluaran yang diinginkan (Aisha dan Khatoon, 2009). Menurut Peacock dan Wiseman (dalam Aisha dan Khatoon, 2009) tingkat pajak dan pengeluaran yang relatif tinggi terjadi pada saat situasi tertentu, seperti perang, bencana alam, atau resesi yang parah. Pada saat itu pengeluaran akan meningkat, begitupun dengan pajak yang dibayarkan oleh wajib pajak juga akan meningkat. Penjelasan hipotesis pengeluaran-penerimaan pajak juga didasari oleh penelitian yang dilakukan oleh Barro mengenai hipotesis penghalusan pajak (*tax smoothing hypothesis*). Pada penelitiannya, Barro menjelaskan bahwa pengeluaran pemerintah dianggap sebagai variabel eksogen yang menyesuaikan pajak.

Terkait dengan hipotesis pengeluaran-penerimaan pajak, dalam penelitiannya, Barro (1979) menjelaskan faktor-faktor penentu hutang publik. Pada penelitiannya, Barro menjabarkan hubungan terkait pengeluaran pemerintah dan sumber pendanaan pengeluaran pemerintah, berupa penerimaan pajak dan hutang publik. Pada penelitiannya Barro (1979) mengasumsikan pemerintah mendanai pengeluarannya melalui dua metode, yaitu melalui pajak saat ini dan hutang publik. Dengan asumsi awal tingkat harga (P) dan tingkat pengembalian riil hutang publik dan privat (r)

konstan dari waktu ke waktu, serta pembayaran bunga selama periode t yang digunakan untuk stok hutang yang belum dilunasi pada awal periode, Barro menyusun persamaan anggaran pemerintah untuk tiap periode sebagai berikut:

$$G_t + rb_{t-1} = \tau_t + (b_t - b_{t-1}) \quad [2.5]$$

Dimana G_t merupakan volume pengeluaran pemerintah riil (selain untuk pembayaran bunga hutang publik) selama periode t , τ_t merupakan penerimaan pajak yang diperoleh pemerintah setiap periode, dan b_t merupakan stok riil hutang publik yang belum dibayarkan pada akhir periode t .

Persamaan anggaran pemerintah pada tiap waktu t dan dengan kondisi tambahan berupa peraturan pendanaan hutang terus menerus berimplikasi terhadap persamaan batas anggaran secara keseluruhan sebagai berikut

$$\sum_1^\infty [G_t / (1 + r)^t] + b_0 = \sum_1^\infty [\tau_t / (1 + r)^t] \quad [2.6]$$

Kondisi ini mengikuti persamaan [2.5] jika b dipaksakan tumbuh secara asimtotik pada tingkat yang lebih rendah dari nilai r .

Penjumlahan antara nilai pengeluaran pemerintah saat ini dan tingkat hutang awal yang berada di sisi kiri pada persamaan [2.6] menentukan nilai penerimaan pajak pemerintah saat ini. Bagaimanapun ketetapan nilai saat ini yang terakhir membuka penentu pola waktu dari pajak. Pada penelitian ini pajak diasumsikan tidak hanya merupakan transfer daya beli dari individu kepada pemerintah, tetapi juga beberapa biaya pengumpulan dan/atau biaya misalokasi tidak langsung yang dikenakan atas perekonomian pribadi (swasta). Jika diberikan nilai saat ini dari

penerimaan pajak bersih, nilai saat ini dari biaya tambahan secara umum akan tergantung pada distribusi pajak berdasarkan jenis dan waktu. Penelitian yang dilakukan oleh Barro (1979) lebih difokuskan pada waktu pajak yang merupakan ringkasan dari penentuan komposisi pajak pada waktu tertentu. Pada dasarnya, analisis waktu bersyarat pada pemilihan komposisi pajak yang optimal mendasari hubungan “fungsi produksi” antara penerimaan pajak bersih dan “kelebihan beban”.

Pada kasus biaya pengumpulan langsung untuk administrasi, penyelenggaraan, dan lainnya, Z_t merupakan biaya riil yang dikeluarkan dan Y_t merupakan pendapatan nasional riil dalam periode t . Dengan asumsi Z_t berpengaruh positif terhadap total pajak bersih untuk periode τ_t dan berpengaruh negatif terhadap kelompok sumber daya kena pajak secara serentak dan tidak berpengaruh terhadap nilai pajak atau pendapatan pada periode lain, serta dengan mengabaikan hubungan khusus biaya pengumpulan dan tingkat pengeluaran pemerintah di waktu yang sama. Kondisi homogenitas penggandakan pengumpulan pajak bersih (τ_t) dan kelompok pajak potensial (Y_t) akan menggandakan biaya pengumpulan (Z_t), sehingga biaya pengumpulan untuk periode t dapat ditulis:

$$Z_t = F(\tau_t, Y_t) = \tau_t f(\tau_t / \tau Y_t) \quad [2.7]$$

Dimana $f' > 0$ dan fungsi f diasumsikan invarian dari waktu ke waktu. Nilai sekarang dari biaya pengumpulan dapat ditulis:

$$Z = \sum_{t=1}^{\infty} \tau_t f(\tau_t / Y_t) / (1 + r)^t \quad [2.8]$$

Permasalahan optimalisasi pemerintah antara lain adalah memilih besarnya τ_1, τ_2, \dots . Untuk meminimalkan nilai saat ini dari biaya peningkatan penerimaan dapat digunakan bentuk fungsi biaya pada persamaan [2.8] dan kendala anggaran keseluruhan pada persamaan [2.6]. Hasil kondisi orde pertama membutuhkan biaya pengumpulan marjinal yang sama untuk meningkatkan penerimaan pajak ($\partial Z_t / \partial \tau_t$) dalam semua periode (tanpa melihat nilai r , karena penerimaan pajak dan biaya pengumpulan yang berhubungan meningkat pada titik waktu yang sama). Dengan spesifikasi yang homogen dari biaya di persamaan [2.8], kondisi tersebut membutuhkan tarif pajak (τ/Y) yang sama dalam semua periode. Jika rasio pajak-pendapatan konstan, tingkat pajak dalam tiap periode dapat ditentukan oleh nilai (Y_t, \dots) , (G_t, \dots) , r , dan b_0 . Hal tersebut karena tingkat pajak akan menyesuaikan dengan kondisi anggaran keseluruhan yang telah ditetapkan pada persamaan [2.6].

Jika rasio pajak-pendapatan konstan dalam pemecahan optimal, pajak akan tumbuh pada tingkat yang sama dengan pendapatan, yaitu $\tau_t = \tau_0(1 + \rho)^t$, ρ merupakan tingkat konstan pertumbuhan pendapatan riil. Dengan menggunakan kondisi anggaran pada persamaan [2.6] maka dapat diperoleh persamaan $\tau_0 = [(r - p)/1 + \rho][G_0(1 + \gamma)/(r - \gamma) + b_0]$ yang digunakan untuk menentukan nilai pajak pada setiap waktu.

Keuangan publik yang optimal masih membutuhkan rasio pajak terhadap pendapatan yang konstan pada semua waktu. Sesuai dengan itu, dari tanggal $n + 1$ dan seterusnya, pajak direncanakan masih tumbuh bersama dengan pendapatan pada

tingkat ρ . Dengan menggunakan fakta dan kondisi anggaran pada persamaan [2.6] dimungkinkan untuk menentukan pajak pada semua waktu. Pemecahan dari hal tersebut dapat ditulis dalam bentuk sebagai berikut:

$$\tau_t = [1/(1 + u)]\tau_1(1 + \rho)^{t-1} \quad [2.9]$$

Dengan $t = n+1, n+2, \dots$

$$\tau_t = \tau_t(1 + \rho)^{t-1}$$

Untuk $t = 1, \dots, n$

$\tau_t =$

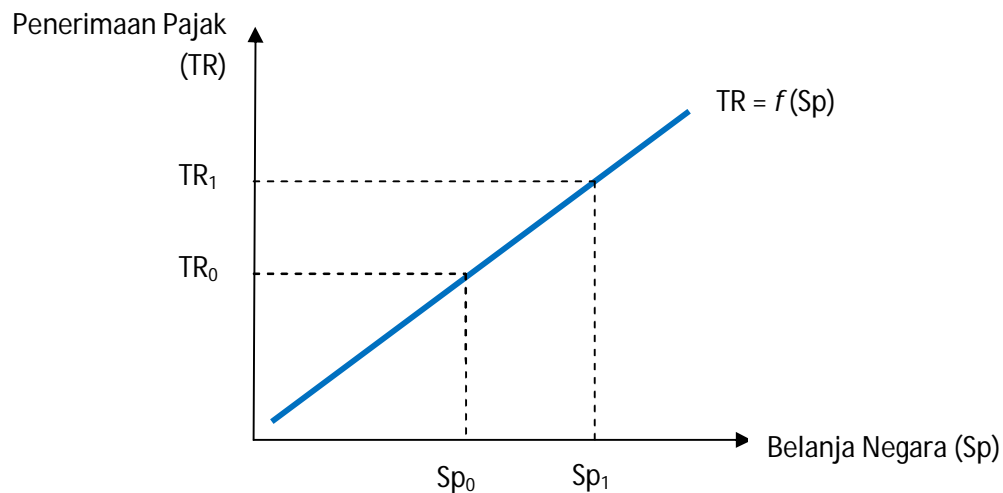
$$\frac{(1+u)}{(1+u)-u[(1+\rho)/(1+r)]^n} (G_0(1 + \rho) + (r - \rho)b_0 + \epsilon G_0(1 + \rho)\{1 - [(1 + \rho)/1 + r]^k\})$$

[2.10]

Pada persamaan di atas, bagian yang berada di dalam kurung di sisi kanan mengukur tingkat tetap keuangan yang diperlukan, serta menandakan komponen sementara dari jumlah pengeluaran pemerintah yang dalam kasus ini merupakan pengeluaran permanen. Jika durasi ekspektasi dari jumlah pengeluaran pemerintah sementara tertentu semakin tinggi, maka jumlah pajak saat ini juga akan semakin besar.

Gambar 2.5 memperlihatkan hubungan antara pengeluaran pemerintah dengan penerimaan pajak. Berdasarkan gambar tersebut, kurva hubungan pengeluaran pemerintah dengan penerimaan pajak memiliki kemiringan positif yang berarti peningkatan pengeluaran pemerintah akan menyebabkan penerimaan pajak meningkat, begitupun sebaliknya.

Gambar 2.5. Kurva Hubungan Belanja Negara dan Penerimaan Pajak



Sumber: Sintesis Penulis

2.2. Penelitian Terdahulu

Penelitian terkait pengaruh variabel ekonomi makro terhadap penerimaan pajak telah dilakukan di berbagai negara. Seperti penelitian Ghura (1998) yang dilakukan di negara-negara Afrika Sub-sahara pada tahun 1985-1996. Pada penelitiannya dianalisis pengaruh variabel pendapatan, dasar pengenaan pajak, kebijakan ekonomi, korupsi, lingkungan luar negeri, serta variabel dummy untuk negara CFA Franc terhadap penerimaan pajak dengan menggunakan data panel 39 negara. Ghura menyimpulkan bahwa peningkatan pada pendapatan dan tingkat keterbukaan ekonomi, serta penurunan bagian pertanian dalam PDB akan menyebabkan peningkatan penerimaan pajak. Berdasarkan analisis koefisien, variabel inflasi memiliki dampak yang sangat besar terhadap rasio penerimaan pajak terhadap PDB.

Penelitian terkait faktor- faktor penerimaan pajak juga dilakukan oleh Karran (1985). Pada penelitiannya digunakan analisis alur kausal dalam menjelaskan pengaruh variabel ekonomi makro terhadap penerimaan pajak di Britania. Variabel yang digunakan dalam penelitian adalah variabel ekonomi berupa pertumbuhan ekonomi dan inflasi, serta variabel politik berupa kelompok pemerintah (*Party Government*) dan kedekatan waktu pemilihan. Berdasarkan analisis yang dilakukan, Karran menyimpulkan bahwa pertumbuhan ekonomi memiliki dampak yang kuat dan signifikan terhadap variabel intervensi yang paling penting, yaitu tagihan upah yang merupakan dasar pajak. Sebaliknya variabel inflasi memiliki pengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap nilai konstan tagihan upah dasar pengenaan pajak. Tarif pajak penghasilan memiliki pengaruh yang signifikan terhadap penerimaan yang dihasilkan. Variabel kelompok pemerintah dan kedekatan pemilihan juga memiliki pengaruh yang signifikan terhadap tarif pajak dan penerimaan pajak penghasilan.

Berbeda dengan penelitian Ghura dan Karran, Basirat, Aboodi, dan Ahangari (2014) melakukan penelitian hanya dengan menggunakan variabel ekonomi. Penelitian Basirat, Aboodi, dan Ahangari terkait faktor yang mempengaruhi penerimaan pajak Iran pada tahun 1974-2011 ini menggunakan model *Autoregression Distributed Lag* (ARDL) untuk mengetahui pengaruh variabel ekonomi berupa nilai tambah sektor industri terhadap PDB, nilai impor tahunan, nilai tukar, nilai tambah sektor perminyakan, dan nilai tambah sektor pertanian. Hasil analisis mengindikasikan dalam jangka panjang variabel nilai tambah sektor industri, impor, nilai tukar, dan nilai tambah sektor perminyakan memiliki pengaruh positif dan

signifikan terhadap penerimaan pajak. Sedangkan variabel nilai tambah sektor pertanian memiliki pengaruh negatif dan signifikan terhadap penerimaan pajak.

Sookram dan Saridakis (2009) juga melakukan penelitian terkait pengaruh faktor ekonomi terhadap penerimaan pajak di Trinidad dan Tobago. Pada penelitiannya, Sookram dan Saridakis menggunakan uji kointegrasi statistik untuk orde kedua (VAR2) berdasarkan pendekatan *maximum likelihood Johansen*. Hasil penelitian menunjukkan terdapat hubungan positif antara tingkat pendapatan dan rasio pajak, dan hubungan negatif antara variabel hutang luar negeri dan inflasi terhadap rasio pajak. Pada penelitian ini juga ditemukan bahwa variabel rasio perdagangan tidak signifikan mempengaruhi penerimaan pajak.

Muibi dan Sinbo (2013) meneliti pengaruh faktor ekonomi makro terhadap penerimaan pajak di Nigeria. Pada penelitiannya digunakan mekanisme koreksi kesalahan (*Error Correction Mechanism/ECM*) untuk menyusun hubungan jangka panjang dan jangka pendek antar variabel ekonomi makro terhadap penerimaan pajak. Berdasarkan analisis empiris yang dilakukan Muibi dan Sinbo dapat disimpulkan bahwa tingkat pertumbuhan aktivitas ekonomi berpengaruh positif terhadap penerimaan pajak di Nigeria, sedangkan depresiasi nilai tukar dan tingkat inflasi memiliki pengaruh negatif terhadap penerimaan pajak. Model jangka pendek menunjukkan bahwa seluruh variabel seperti PDB, nilai tukar, tingkat inflasi secara signifikan mempengaruhi penerimaan pajak, sedangkan variabel keterbukaan perdagangan dan hutang luar negeri tidak signifikan pada periode penelitian.

Penelitian terkait dengan studi kasus Indonesia dilakukan oleh Sinaga (2010). Pada penelitiannya, Sinaga mengestimasi pengaruh variabel ekonomi makro, berupa pertumbuhan ekonomi, nilai tukar rupiah terhadap USD, inflasi, perubahan tingkat suku bunga SBI, harga minyak mentah dunia, dan transaksi impor terhadap total penerimaan pajak, dan penerimaan jenis-jenis pajak lainnya, yaitu PPh, PPN, dan PBB. Hasil estimasi analisis regresi linear berganda dengan metode OLS menunjukkan bahwa variabel total penerimaan pajak dan variabel penerimaan PPN dipengaruhi oleh PDB, nilai tukar rupiah terhadap USD, nilai impor, dan inflasi. Variabel penerimaan PPh dipengaruhi oleh nilai PDB, nilai tukar rupiah terhadap USD, nilai impor, dan tingkat suku bunga SBI, sedangkan penerimaan PBB dan BPHTB dipengaruhi oleh PDB, nilai tukar rupiah terhadap USD, dan harga minyak mentah dunia.

2.3. Kerangka Pemikiran Teoretis

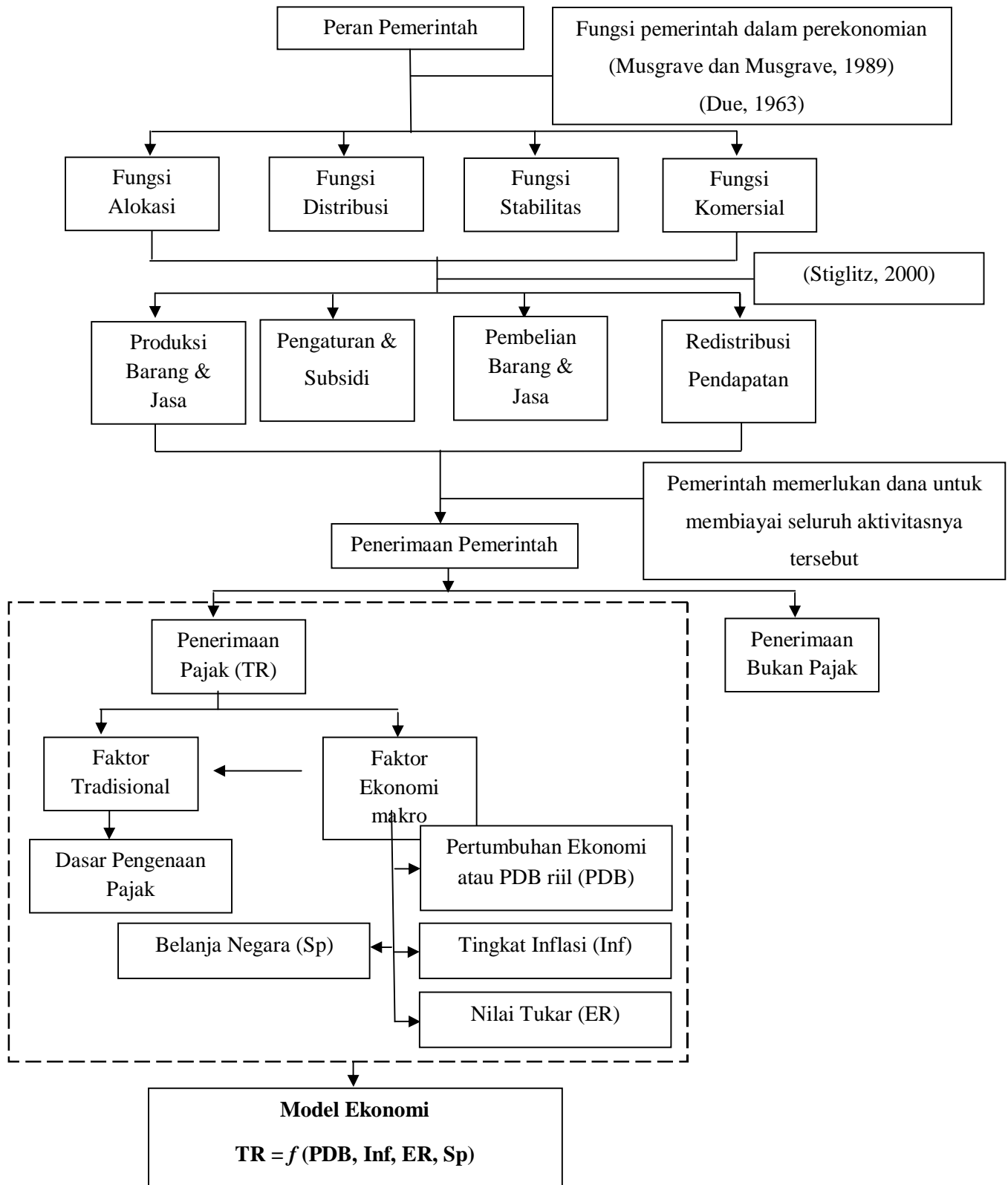
Pada teori ekonomi publik telah dijelaskan bahwa pemerintah memegang peran yang strategis dalam perekonomian. Pada Gambar 2.3 diperlihatkan bahwa pemerintah memiliki empat fungsi utama dalam perekonomian suatu negara, seperti yang telah dijelaskan sebelumnya. Pemerintah juga memiliki peran dalam aliran dana pendapatan dan pengeluaran pada perekonomian. Sebagai penyelenggara negara, Pemerintah juga berfungsi menciptakan kesejahteraan rakyat melalui pembangunan. Pemerintah juga bertugas menyediakan barang dan jasa yang tidak dapat disediakan oleh pasar.

Dalam menyediakan barang dan jasa tersebut Pemerintah memerlukan penerimaan sebagai sumber pendanaan. Sumber dana tersebut berasal dari pendapatan negara yang secara khusus dapat bersumber dari penerimaan pajak, penerimaan bukan pajak, hibah maupun pembiayaan. Penerimaan pajak merupakan sumber yang potensial dan terbesar bagi penerimaan negara. Sehingga untuk meningkat penerimaan negara Pemerintah perlu menyusun kebijakan dan perencanaan penerimaan pajak yang sesuai dengan kondisi perekonomian.

Pada penelitian ini analisis model penerimaan pajak dilakukan dengan menggunakan beberapa variabel ekonomi makro berupa PDB riil, tingkat inflasi, dan nilai tukar. Selain tiga variabel makro tersebut pada penelitian ini juga dimasukkan variabel belanja negara. Sehingga penerimaan pajak dapat dituliskan sebagai fungsi dari PDB, tingkat inflasi, nilai tukar, dan belanja negara atau dapat dituliskan:

$$TR = f(PDB, Inf, ER, Sp)$$

Gambar 2.6. Kerangka Pemikiran Teoritis



Variabel-variabel makro yang digunakan dalam penelitian tidak mempengaruhi penerimaan pajak secara langsung. Seperti yang dijelaskan sebelumnya perubahan pada PDB, tingkat inflasi, nilai tukar rupiah serta belanja negara mempengaruhi penerimaan pajak melalui perubahan dasar pengenaan pajak. Perubahan yang terjadi pada PDB, tingkat inflasi, nilai tukar, serta belanja negara akan mengubah nilai dasar penerimaan pajak. Perubahan nilai dasar penerimaan pajak tersebut yang nantinya akan mengubah besarnya penerimaan pajak.

2.4. Hipotesis Penelitian

Berdasarkan kajian teoritis dan kerangka pemikiran yang telah dipaparkan sebelumnya, maka dapat dibuat hipotesis penelitian sebagai berikut:

1. Produk domestik bruto riil berpengaruh positif terhadap penerimaan pajak;
2. Tingkat inflasi berpengaruh negatif terhadap penerimaan pajak;
3. Overvaluasi nilai tukar rupiah terhadap USD menyebabkan penurunan penerimaan pajak. atau dapat pula dikatakan nilai tukar rupiah terhadap USD memiliki pengaruh positif terhadap penerimaan pajak (asumsi: dalam kondisi neraca pembayaran mengalami surplus);
4. Belanja negara berpengaruh positif terhadap penerimaan pajak.

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Variabel Penelitian dan Definisi Operasional Variabel

3.1.1 Variabel Penelitian

Pada penelitian ini digunakan lima variabel penelitian yang terdiri dari satu variabel terikat atau variabel dependen, serta enam variabel bebas atau variabel independen. Variabel-variabel tersebut adalah penerimaan pajak sebagai variabel terikat, produk domestik bruto riil, inflasi, nilai tukar rupiah terhadap USD, serta belanja negara sebagai variabel penjelas. Berikut definisi operasional masing-masing variabel penelitian yang digunakan.

3.1.2 Definisi Operasional Variabel

a. Penerimaan Pajak (TR)

Penerimaan pajak sebagai variabel terikat pada penelitian ini merepresentasikan penerimaan pemerintah yang berasal dari iuran wajib masyarakat yang dibayarkan kepada pemerintah berdasarkan dasar pengenaan pajak dan diatur dalam Undang-undang. Pada penelitian ini, data penerimaan pajak yang digunakan adalah total penerimaan pajak pemerintah pusat dalam periode satu tahun yang mencakup pajak penghasilan (PPh), pajak pertambahan nilai (PPN), pajak penjualan atas barang mewah (PPnBM), pajak bumi dan bangunan (PBB), cukai, pajak perdagangan internasional (PPI), dan pajak lainnya dengan satuan miliar rupiah. Total penerimaan pajak selama satu tahun juga dapat ditulis sebagai berikut:

$$TR = PPh + PPN + PPnBM + PBB + cukai + PPI + Pajak lainnya \quad [3.1]$$

b. Produk Domestik Bruto (PDB)

Produk domestik bruto sebagai variabel bebas pada penelitian ini direpresentasikan sebagai jumlah nilai tambah yang dihasilkan oleh seluruh unit usaha dalam suatu negara atau dapat juga diartikan sebagai jumlah nilai barang dan jasa akhir yang dihasilkan oleh seluruh unit ekonomi. Pemilihan produk domestik bruto sebagai salah satu variabel bebas pada penelitian ini karena produk domestik bruto merupakan indikator utama dalam perekonomian. Produk domestik bruto dapat menggambarkan aktivitas perekonomian dan output yang dihasilkan oleh suatu negara. Selain itu nilai PDB juga digunakan dalam perhitungan pertumbuhan ekonomi. Oleh karena itu, produk domestik bruto merupakan variabel yang penting dalam analisis terkait ekonomi makro. Penggunaan variabel PDB menunjukkan besarnya pendapatan nasional Indonesia.

Pada penelitian ini, data produk domestik bruto yang digunakan adalah PDB atas harga konstan atau biasa disebut PDB riil. PDB atas harga konstan menunjukkan nilai tambah dari barang dan jasa tersebut yang dihitung dengan menggunakan harga yang berlaku pada satu tahun tertentu sebagai dasar. Pada penelitian ini data PDB yang digunakan berdasarkan tahun dasar 2000 dengan satuan miliar rupiah.

c. Inflasi (Inf)

Inflasi merupakan kenaikan harga barang dan jasa secara umum, yaitu barang dan jasa tersebut termasuk kebutuhan pokok masyarakat atau turunnya daya jual mata

uang suatu negara pada satu periode tertentu. Pemilihan tingkat inflasi sebagai variabel bebas dalam penelitian ini karena tingkat inflasi merupakan salah satu asumsi ekonomi makro yang digunakan dalam penyusunan komponen APBN. Selain itu, tingkat inflasi sebagai tingkat perubahan harga secara umum juga dapat memperlihatkan kondisi ekonomi suatu negara.

Pada penelitian ini, data inflasi yang diukur berdasarkan indeks harga konsumen (*Consumer Price Index*). Indeks harga konsumen atau IHK diartikan sebagai indeks yang menghitung rata-rata perubahan harga dalam suatu periode, dari suatu kumpulan barang dan jasa yang dikonsumsi oleh penduduk/rumah tangga dalam kurun waktu tertentu.

Besarnya IHK dapat dihitung dengan menggunakan *Laspeyres Index* dengan rumus sebagai berikut:

$$\text{Laspeyres Index} = \frac{\sum P_n q_0}{\sum P_0 q_0} \times 100 \quad [3.2]$$

Dimana P_0 merupakan tingkat harga yang berlaku pada tahun awal observasi, q_0 adalah jumlah barang yang dikonsumsi pada periode awal observasi dan P_n merupakan tingkat harga yang berlaku pada tahun n. Data IHK yang digunakan untuk mengukur inflasi adalah data IHK dengan tahun dasar 2000. Besarnya inflasi dapat dihitung sebagai tingkat perubahan IHK antar periode atau secara matematis dapat ditulis sebagai berikut:

$$\text{Inf} = \frac{\text{IHK}_t - \text{IHK}_{t-1}}{\text{IHK}_{t-1}} \times 100 \quad [3.3]$$

Berdasarkan perhitungan tersebut akan diperoleh data inflasi berdasarkan indeks harga konsumen.

d. Nilai Tukar (ER)

Nilai tukar merupakan harga mata uang asing yang dinyatakan dalam mata uang domestik yang ditentukan oleh Bank Indonesia selaku otoritas moneter Indonesia. Pada penelitian ini mata uang asing yang digunakan adalah US dollar dan mata uang domestik menggunakan Rupiah. Variabel nilai tukar juga digunakan dalam penelitian ini karena penerimaan pajak yang digunakan dalam penelitian juga menyertakan pajak atas kegiatan perdagangan internasional sehingga variabel nilai tukar dianggap sangat penting untuk melihat nilai riil dari ekspor maupun impor barang atau jasa.

e. Belanja Negara (Sp)

Belanja negara merupakan variabel APBN yang merepresentasikan total seluruh pengeluaran negara dalam satu tahun anggaran yang sifatnya mengurangi ekuitas dana lancar dan merupakan kewajiban negara, serta nantinya tidak memperoleh pembayaran kembali oleh negara. Total belanja negara diperoleh dari penjumlahan antara belanja pemerintah pusat dan pengeluaran transfer ke daerah. Pengeluaran pemerintah pusat sendiri terdiri dari pembelian pemerintah (belanja pegawai, belanja barang, belanja modal, pembayaran bunga, pembayaran transfer, bantuan sosial, dan subsidi) dan belanja lainnya. Variabel belanja negara dimasukkan sebagai variabel bebas dalam penelitian karena kebijakan belanja negara juga

dianggap sebagai dasar penentuan rencana jumlah penerimaan pajak. Data belanja negara yang digunakan dalam penelitian ini dalam satuan miliar rupiah.

3.2. Jenis dan Sumber Data

3.2.1 Jenis Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder. Data sekunder merupakan data yang tidak dikumpulkan secara langsung oleh peneliti, tetapi diperoleh atau dikumpulkan dari lembaga atau instansi terkait. Pada penelitian ini data yang digunakan merupakan data runtun waktu (*time series*). Data runtun waktu merupakan data yang dikumpulkan dari setiap periode waktu ke waktu. Data runtun waktu tersebut digunakan untuk menunjukkan kondisi perkembangan suatu data dari waktu ke waktu. Pada penelitian ini observasi yang digunakan adalah tahun 1976 sampai dengan tahun 2013.

3.3.2 Sumber Data

Data-data yang digunakan dalam penelitian ini diperoleh dari berbagai instansi yang terkait, seperti Kementerian Keuangan, Badan Pusat Statistik, dan Bank Indonesia. Data penerimaan pajak dan belanja negara diperoleh dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Indonesia yang dikeluarkan oleh Kementerian Keuangan. Data produk domestik bruto dan tingkat inflasi diperoleh dari Badan Pusat Statistik. Sedangkan untuk data nilai tukar rupiah terhadap USD diperoleh dari Bank Indonesia. Pengumpulan data dilakukan dengan teknik studi kepustakaan, yaitu

dengan cara mengumpulkan data melalui dokumen-dokumen dan literatur-literatur yang relevan dengan penelitian.

3.3. Metode Analisis

3.3.1. Model Empiris

Pada penelitian ini digunakan analisis model regresi linear berganda (*Multiple Regression Analysis*) dengan metode kuadrat terkecil atau *Ordinary Least Square* (OLS) untuk menganalisis pengaruh variabel bebas terhadap variabel terikat. Metode OLS dipilih karena metode ini dianggap lebih sederhana dan telah cukup untuk melakukan estimasi dan pengujian hipotesis dari regresi linear (Gujarati dan Porter, 2009).

Selain itu, pada penelitian ini juga digunakan analisis Model Koreksi Kesalahan (*Error Correction Model/ECM*) untuk menganalisis pengaruh variabel bebas terhadap variabel terikat dalam jangka pendek. Metode analisis ECM merupakan metode yang digunakan untuk mengestimasi pengaruh variabel bebas terhadap variabel terikat dengan mengakomodasi unsur *lagged* pada model. Selain itu, ECM juga digunakan untuk merepresentasikan hubungan ketidakseimbangan atau hubungan jangka pendek dari suatu model (Thomas, 1997). Pada penelitian ini metode ECM yang dilakukan adalah metode prosedur dua tingkat Engle dan Granger (*The Engle-Granger two-stage procedure*) yang diperkenalkan oleh Robert F. Engle dan C. W. J. Granger. Dalam menjalankan prosedur tersebut terdapat dua tahap yang perlu dilakukan untuk estimasi. Tahap pertama yang dilakukan adalah melakukan

estimasi parameter jangka panjang serta uji kointegrasi dan pada tahap kedua dilakukan estimasi parameter untuk jangka pendek.

3.3.1.1. Estimasi Hubungan Keseimbangan Jangka Panjang

Estimasi hubungan keseimbangan jangka panjang dapat dilakukan secara sederhana dengan mengestimasi regresi seluruh variabel yang terkointegrasi (Thomas, 1997). Pada estimasi jangka panjang uji kointegrasi harus dilakukan. Uji kointegrasi dilakukan untuk memastikan apakah terdapat hubungan keseimbangan atau hubungan jangka panjang pada model yang diestimasi, tiap variabel yang digunakan harus saling berkointegrasi dengan variabel lainnya. Pada penelitian ini, pengujian kointegrasi dilakukan dengan menggunakan uji Engle-Granger (*Engle-Granger Test* atau *Augmented Engle-Granger Test*). Uji Engle-Granger dilakukan dengan menggunakan residual yang diperoleh dari hasil regresi variabel independen terhadap variabel dependen pada model keseimbangan jangka panjang. Kemudian dilakukan uji-ADF pada residual tersebut. Jika hasil uji-ADF menunjukkan residual tersebut stasioner pada $I(0)$, maka terdapat kointegrasi antar variabel.

Jika tiap variabel telah terkointegrasi, maka dapat dipastikan terdapat hubungan jangka panjang atau hubungan keseimbangan antar variabel (Gujarati dan Porter, 2009). Dengan menggunakan variabel yang telah ditetapkan dalam penelitian ini berupa penerimaan pajak dan variabel makro lainnya, model hubungan jangka panjang atau hubungan keseimbangan pada penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut :

$$LNTR_t = \alpha_0 + \beta_0 LNGDP_t + \beta_1 Inf_t + \beta_2 LNSp_t + \beta_3 LNER_t + u_t \quad [3.4]$$

Keterangan α_0 = Ln Konstanta

$LNGDP_t$ = Ln Produk domestik bruto

Inf_t = Inflasi

$LNSp_t$ = Ln belanja negara

$LNER_t$ = Ln nilai tukar rupiah terhadap USD

u_t = error term

$\beta_0, \beta_1, \beta_2, \beta_3$ = Elastisitas jangka panjang

3.3.1.2. Estimasi Hubungan Jangka Pendek

Setelah antar *time series* memiliki hubungan jangka panjang dan saling berkointegrasi, maka dapat pula diestimasi hubungan ketidakseimbangan jangka pendek antar variabel. Hubungan ketidakseimbangan jangka pendek tersebut dapat diestimasi dengan memasukkan unsur *lagged* (t-1) pada semua variabel. Hubungan ketidakseimbangan jangka pendek pada model penerimaan pajak dengan variabel makro lainnya dapat dirumuskan sebagai berikut :

$$TR_t = b_0 + b_1 GDP_t + b_2 GDP_{t-1} + b_3 Inf_t + b_4 Inf_{t-1} + b_5 Sp_t + b_6 Sp_{t-1} + b_7 ER_t + b_8 ER_{t-1} + \mu TR_{t-1} + \varepsilon_t \quad [3.5]$$

Agar tidak menghasilkan regresi palsu, estimasi di atas perlu disusun ulang. Pertama, dalam menyusun ulang estimasi di atas dikurangi TR_{t-1} pada kedua sisinya

$$TR_t - TR_{t-1} = b_0 + b_1 GDP_t + b_2 GDP_{t-1} + b_3 Inf_t + b_4 Inf_{t-1} + b_5 Sp_t + b_6 Sp_{t-1} + b_7 ER_t + b_8 ER_{t-1} + \mu TR_{t-1} - TR_{t-1} + \varepsilon_t$$

Dan dapat ditulis menjadi

$$TR_t - TR_{t-1} = b_0 + b_1GDP_t + b_2GDP_{t-1} + b_3Inf_t + b_4Inf_{t-1} + b_5Sp_t + b_6Sp_{t-1} + b_7ER_t + b_8ER_{t-1} - (1 - \mu)TR_{t-1} + \varepsilon_t \quad [3.6]$$

Kemudian lakukan penjumlahan dan pengurangan pada sisi kanan dengan: b_1GDP_{t-1}

, b_3Inf_{t-1} , b_5Sp_{t-1} , b_7ER_{t-1}

$$TR_t - TR_{t-1} = b_0 + b_1GDP_t - b_1GDP_{t-1} + b_1GDP_{t-1} + b_2GDP_{t-1} + b_3Inf_t - b_3Inf_{t-1} + b_3Inf_{t-1} + b_4Inf_{t-1} + b_5Sp_t - b_5Sp_{t-1} + b_5Sp_{t-1} + b_6Sp_{t-1} + b_7ER_t - b_7ER_{t-1} + b_7ER_{t-1} + b_8ER_{t-1} - (1 - \mu)TR_{t-1} + \varepsilon_t$$

Atau dapat juga ditulis

$$\Delta TR_t = b_0 + b_1\Delta GDP_t + (b_1 + b_2)GDP_{t-1} + b_3\Delta Inf_t + (b_3 + b_4)Inf_{t-1} + b_5\Delta Sp_t + (b_5 + b_6)Sp_{t-1} + b_7\Delta ER_t + (b_7 + b_8)ER_{t-1} - \lambda TR_{t-1} + \varepsilon_t \quad [3.7]$$

Dimana $\lambda = 1 - \mu$

Dari persamaan di atas dapat dimanipulasi dengan membentuk parameter baru, yaitu

$$\beta_1 = \frac{b_1+b_2}{\lambda}, \beta_2 = \frac{b_3+b_4}{\lambda}, \beta_3 = \frac{b_5+b_6}{\lambda}, \beta_4 = \frac{b_7+b_8}{\lambda}$$

sehingga

$$\Delta TR_t = b_0 + b_1\Delta GDP_t + b_3\Delta Inf_t + b_5\Delta Sp_t + b_7\Delta ER_t - \lambda(TR_{t-1} - \alpha_0 - \beta_1GDP_{t-1} - \beta_2Inf_{t-1} - \beta_3Sp_{t-1} - \beta_4ER_{t-1}) + \varepsilon_t \quad [3.8]$$

dimana α_0 merupakan konstanta model jangka panjang.

Persamaan [3.8] dapat disebut persamaan ECM sederhana pada orde pertama dengan

$(TR_{t-1} - \alpha_0 - \beta_1GDP_{t-1} - \beta_2Inf_{t-1} - \beta_3Sp_{t-1} - \beta_4ER_{t-1})$ sebagai *Error Correction Term*.

3.3.2. Uji Normalitas dan Pelanggaran Asumsi Klasik

3.3.2.1 Uji Normalitas

Pada estimasi regresi, faktor kesalahan harus terdistribusi normal. Uji normalitas dapat dilakukan dengan berbagai cara pengujian, antara lain dengan melihat bentuk histogram residual, pola probabilitas normal, dan uji normalitas Jarque-Bera (JB). Pada penelitian ini uji normalitas dilakukan dengan menggunakan uji Jarque-Bera. Uji JB terlebih dahulu dilakukan dengan menghitung besarnya nilai skewness (S) dan nilai kurtosis (K) yang mengukur residual OLS, kemudian dengan n sebagai ukuran sampel dapat dihitung nilai JB dengan rumus sebagai berikut:

$$JB = n \left[\frac{S^2}{6} + \frac{(K-3)^2}{24} \right] \quad [3.9]$$

Pada uji JB hipotesis nol menyebutkan bahwa residual terdistribusi normal. Jika nilai p yang dihitung pada aplikasi JB statistik cukup rendah, maka hipotesis nol ditolak. Sebaliknya jika nilai p tersebut cukup tinggi, maka hipotesis nol tidak ditolak atau dengan kata lain faktor gangguan terdistribusi secara normal.

3.3.2.2 Uji Multikolinearitas

Salah satu asumsi klasik adalah tidak terdapat kolinearitas antara regresor yang terdapat pada model regresi yang diestimasi atau dengan kata lain tidak terdapat multikolinearitas antar regresor. Kondisi multikolinearitas dapat diartikan sebagai kondisi dimana terdapat hubungan linear yang sempurna atau tepat antara beberapa atau semua variabel penjelas. Kondisi multikolinearitas dapat dideteksi melalui beberapa cara, antara lain dengan nilai R^2 dan t -ratio, korelasi berpasangan yang

tinggi di antara regresor, pemeriksaan korelasi parsial, *auxiliary regression*, *eigenvalue* dan indeks kondisi, toleransi dan VIF, serta *scatterplot*. Pada penelitian ini multikolinearitas dideteksi dengan menggunakan *auxiliary regression*. Metode ini dilakukan dengan meregresi tiap variabel independen (X_i) terhadap variabel independen (X), kemudian membandingkan nilai R^2 (atau biasa ditulis R_i^2) yang diperoleh dari *auxiliary regression* dengan nilai R^2 yang diperoleh dari regresi utama variabel Y terhadap seluruh variabel X (Gujarati dan Porter, 2009). Berdasarkan kriteria *Klein' rule of thumb* multikolinearitas menjadi masalah jika nilai R^2 yang diperoleh dari *auxiliary regression* lebih besar daripada R^2 keseluruhan.

3.3.2.3 Uji Heteroskedastisitas

Selain asumsi terkait multikolinearitas, asumsi klasik juga menyebutkan bahwa faktor gangguan u_i yang muncul pada fungsi regresi populasi adalah homoskedastik atau dengan kata lain faktor gangguan u_i tersebut memiliki varians yang sama. Asumsi mengenai homoskedastisitas menjelaskan bahwa varians setiap faktor gangguan u_i kondisional terhadap nilai variabel penjelas yang dipilih merupakan suatu angka konstan yang sama dengan σ^2 . Penyimpangan yang terkait asumsi tersebut adalah heteroskedastisitas. Suatu model dikatakan terdapat heteroskedastisitas jika varians kondisional variabel dependen meningkat seiring dengan meningkatnya variabel independen atau dapat dikatakan varians variabel dependen (y_i) tidak sama.

Kondisi heteroskedastisitas dapat dideteksi dengan metode informal berupa sifat alamiah problem dan metode grafis, serta dengan metode formal dengan melakukan uji-uji, seperti uji Park, uji glejser, uji korelasi Spearman, uji Goldfeld-Quant, uji Breusch-Pagan-Godfrey, uji heteroskedastisitas White umum, dan uji heteroskedastisitas yang lain. Pada penelitian ini uji heteroskedastisitas dilakukan dengan menggunakan uji heteroskedastisitas White umum. Pada penelitian ini uji White dipilih karena uji White tidak terlalu memperdulikan asumsi normalitas dan mudah untuk diimplementasikan. Uji White dilakukan dengan meregres residual kuadrat dengan seluruh variabel independen, variabel independen kuadrat dan perkalian antar variabel independen (Ghozali dan Ratmono, 2013). Pada model jangka panjang, uji White dilakukan dengan meregres persamaan berikut:

$$\begin{aligned} \hat{u}_t^2 = & \alpha_0 + \alpha_1 PDB_t + \alpha_2 Inf_t + \alpha_3 ER_t + \alpha_4 Sp_t + \alpha_5 PDB_t^2 + \alpha_6 Inf_t^2 + \\ & \alpha_7 ER_t^2 + \alpha_8 Sp_t^2 + \alpha_9 PDB_t Inf_t + \alpha_{10} PDB_t ER_t + \alpha_{11} PDB_t Sp_t + \alpha_{12} Inf_t ER_t + \\ & \alpha_{13} Inf_t Sp_t + \alpha_{14} ER_t Sp_t + v_t \end{aligned} \quad [3.10]$$

Sedangkan pada model jangka pendek, uji White dilakukan dengan meregres persamaan berikut:

$$\begin{aligned} \hat{u}_t^2 = & \alpha_0 + \alpha_1 DPDB_t + \alpha_2 Inf_t + \alpha_3 DER_t + \alpha_4 DSp_t + \alpha_5 U_{t-1} + \alpha_6 DPDB_t^2 + \\ & \alpha_7 Inf_t^2 + \alpha_8 DER_t^2 + \alpha_9 DSp_t^2 + \alpha_{10} U_{t-1}^2 + \alpha_{11} DPDB_t Inf_t + \alpha_{12} DPDB_t DER_t + \\ & \alpha_{13} DPDB_t DSp_t + \alpha_{14} DPDB_t U_{t-1} + \alpha_{15} Inf_t DER_t + \alpha_{16} Inf_t DSp_t + \\ & \alpha_{17} Inf_t U_{t-1} + \alpha_{18} DER_t DSp_t + \alpha_{19} DER_t U_{t-1} + \alpha_{20} DSp_t U_{t-1} + v_t \end{aligned} \quad [3.11]$$

Pada uji White hipotesis nol menyebutkan bahwa tidak terdapat heteroskedastisitas. Jika nilai chi-square hitung lebih besar dari nilai chi-square kritis, maka hipotesis nol ditolak. Sebaliknya jika nilai chi-square hitung lebih rendah dari nilai chi-square kritis, hipotesis nol tidak ditolak dan berarti tidak terdapat heteroskedastisitas (Gujarati dan Porter, 2009).

3.3.2.4 Uji Autokorelasi

Pelanggaran asumsi klasik lainnya adalah terkait dengan autokorelasi. Pada model klasik diasumsikan bahwa faktor gangguan yang berhubungan dengan beberapa observasi tidak dipengaruhi oleh faktor gangguan yang berhubungan dengan observasi lainnya atau dapat diasumsikan bahwa tidak terdapat autokorelasi pada faktor gangguan u_i . Kondisi autokorelasi dapat dideteksi dengan berbagai metode, antara lain metode grafis, *run test*, uji d Durbin-Watson, dan uji Breusch-Godfrey. Pada penelitian ini pendeteksian autokorelasi dilakukan dengan menggunakan uji Breusch-Godfrey (BG). Uji Breusch-Godfrey digunakan karena uji BG dapat digunakan untuk menguji autokorelasi pada observasi dengan memasukkan unsur *lag* dan sampel kecil.

Uji BG dilakukan dengan meregresi residual (\hat{u}_t) yang diperoleh dari model asal dengan seluruh variabel independen yang digunakan dalam model dengan menggunakan orde ρ . Pada uji BG hipotesis nol menyebutkan bahwa tidak terdapat autokorelasi pada setiap orde. Jika nilai chi-square hitung lebih besar daripada nilai

chi-square tabel pada tingkat signifikan yang dipilih, maka hipotesis nol ditolak sehingga pada model tersebut terdapat masalah autokorelasi.

Pada penelitian ini, uji autokorelasi dilakukan pada model jangka panjang dan jangka pendek. Pada model jangka panjang uji BG dilakukan pada persamaan berikut:

$$\hat{u}_t = \alpha_1 + \alpha_2 GDP_t + \alpha_3 Inf_t + \alpha_4 ER_t + \alpha_4 Sp_t + \varepsilon_t \quad [3.12]$$

Pada model jangka pendek uji BG dilakukan pada persamaan sebagai berikut:

$$\hat{u}_t = \alpha_1 + \alpha_2 GDP_t + \alpha_3 Inf_t + \alpha_4 ER_t + \alpha_4 Sp_t + \hat{\rho}_1 \hat{u}_{t-1} + \varepsilon_t \quad [3.13]$$

Dimana ε_t merupakan *white noise error term*.

3.3.2.5. Metode Newey-West Guna Memperbaiki *Standard Error OLS*

Selain menggunakan FGLS, koreksi autokorelasi juga dapat dilakukan dengan menggunakan OLS. Metode OLS masih dapat digunakan untuk masalah autokorelasi, tetapi kita perlu melakukan perbaikan nilai *standard error* dengan menggunakan prosedur yang dibangun oleh Newey-West. *Standard error* yang telah dikoreksi tersebut dikenal dengan HAC (*Heteroscedasticity- and autocorrelation-consistent standard error*). Selain mengoreksi permasalahan autokorelasi, Metode Newey-West juga dapat mengoreksi masalah heteroskedastisitas. Pada penelitian ini, metode Newey-West HAC dipilih untuk koreksi permasalahan autokorelasi karena metode ini lebih mudah dilakukan jika dibandingkan dengan metode FGLS.

3.3.3. Pengujian *Goodness of Fit* (R^2)

Nilai R^2 digunakan untuk mengukur *goodness of fit* pada persamaan regresi majemuk. Nilai R^2 menjelaskan besarnya proporsi dari total variasi variabel dependen yang dapat dijelaskan oleh variabel-variabel independen secara bersama-sama. R^2 juga dapat didefinisikan sebagai rasio penjelas atas jumlah kuadrat (ESS) terhadap total jumlah kuadrat (TSS). R^2 memiliki nilai antara 0 dan 1 ($0 \leq R^2 \leq 1$). Jika nilai R^2 sama dengan 1, maka garis regresi dapat menjelaskan 100 persen variasi pada variabel dependen. Jika nilai R^2 sebesar 0, maka model regresi yang diestimasi tidak dapat menjelaskan sama sekali variasi pada variabel dependen. Suatu model regresi dapat dikatakan baik jika nilai R^2 mendekati 1 (Gujarati dan Porter, 2009).

3.3.4. Pengujian Hipotesis Statistik

Pengujian hipotesis statistik meliputi uji F dan uji t. Uji F dilakukan untuk menjelaskan pengaruh seluruh variabel independen terhadap variabel dependen. Sedangkan uji t dilakukan untuk menguji hipotesis terkait pengaruh masing-masing variabel independen terhadap variabel dependen.

3.3.4.1 Pengujian Koefisien Regresi Serentak (Uji F)

Uji F-statistik dapat digunakan untuk mengetahui apakah variabel independen pada penelitian secara serentak (bersama-sama) memiliki pengaruh yang signifikan terhadap variabel dependen. Pada pengujian ini hipotesis nol menyatakan bahwa variabel independen secara bersama-sama tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap variabel dependen. Uji F dilakukan dengan menghitung nilai F-statistik. Jika

nilai F-hitung yang dihasilkan lebih besar dari F-tabel (F-kritis), maka hipotesis nol ditolak dan dapat diambil kesimpulan bahwa seluruh variabel independen yang digunakan dalam model regresi tersebut secara bersama-sama memiliki pengaruh yang signifikan terhadap variabel dependen. Jika nilai F-hitung yang dihasilkan lebih kecil dari F-tabel, maka hipotesis nol tidak ditolak dan disimpulkan bahwa seluruh variabel independen yang digunakan secara bersama-sama tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap variabel dependen.

3.3.4.2 Pengujian Koefisien Regresi Individu (Uji t)

Uji t-statistik digunakan untuk menguji apakah koefisien regresi tiap variabel independen secara parsial (individu) memiliki pengaruh yang signifikan terhadap variabel dependen. Uji t juga dapat dilakukan untuk menguji hipotesis secara parsial. Pada pengujian ini, hipotesis nol menyatakan bahwa variabel independen secara individu tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap variabel dependen. Sedangkan hipotesis alternatif menyatakan bahwa variabel independen secara individu memiliki pengaruh yang signifikan terhadap variabel dependen. Seperti pada uji F, pengambilan keputusan pada uji t juga dilakukan dengan mencari nilai t-hitung. Jika nilai t-hitung lebih besar dari t-tabel (t-kritis), maka hipotesis nol ditolak dan dapat diambil kesimpulan bahwa variabel independen secara individu memiliki pengaruh yang signifikan terhadap variabel dependen. Jika nilai t-hitung lebih kecil dari t-tabel, maka hipotesis nol tidak ditolak, sehingga dapat disimpulkan bahwa variabel independen secara individu tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap variabel dependen.